

**RESPON AUSTRALIA TERHADAP PENINGKATAN KAPABILITAS
MILITER INDONESIA (2007 – 2017)**

(Skripsi)

Oleh

NADIA INTAN LESTARI



**JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDARLAMPUNG
2018**

ABSTRAK

RESPON AUSTRALIA TERHADAP PENINGKATAN KAPABILITAS MILITER INDONESIA (2007 – 2017)

Oleh

NADIA INTAN LESTARI

Australia dan Indonesia merupakan dua negara yang secara letak geografis berdekatan. Peningkatan kapabilitas militer yang dilakukan Indonesia sepanjang tahun 2007 – 2017 telah membawa Australia mengalami dilema keamanan namun tetap bertindak defensif dan kooperatif terhadap Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait respon yang diberikan Australia terhadap adanya peningkatan kapabilitas militer yang dilakukan oleh Indonesia dari tahun 2007 – 2017. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan konsep *security dilemma*, *offense – defense balance*, respon dan strategi. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang meliputi studi pustaka dan studi dokumentasi. Hasil temuan dari penelitian ini mengungkapkan bahwa Australia merespon peningkatan kapabilitas militer Indonesia dengan tiga hal yakni meliputi peningkatan kapabilitas militer, tindakan agresif yang memicu konflik . Namun pada akhirnya Australia tetap menunjukkan tindakan defensif dan koopeatif melalui pembangunan kerjasama militer dengan Indonesia pada periode 2007 – 2017.

Kata Kunci :

Respon, Australia, Indonesia, Dilema Keamanan

ABSTRACT

AUSTRALIA'S RESPONSE OF THE INCREASING INDONESIA'S MILITARY CAPABILITIES (2007 – 2017)

By

NADIA INTAN LESTARI

Australia and Indonesia were two country that nearest on the geographical. The increasing of Indonesia's military capabilities over period 2007 – 2017 has brought Australia into security dilemma but still showed the defensive and cooperative's action to Indonesia. This research tries to explain regarding the response Australia into the increasing of Indonesia's military capabilities during 2007 – 2017. In this study, the researcher uses security dilemma, offense defense balance, response and strategy's concept. The type of research that researcher use is qualitative and library data collection techniques. The findings in this research reveal that Australia give three response of the increasing of Indonesia's military capabilities, those are : increasing of its military capabilities, did the aggressive action which one foment the conflict of Indonesia and Australia. But at the end Australia still showed the defensive and cooperative action from the development of military cooperation with Indonesia on period of 2007 -2017.

Key words :

Response, Australia, Indonesia, Security Dilemma

**RESPON AUSTRALIA TERHADAP PENINGKATAN
KAPABILITAS MILITER INDONESIA (2007- 2017)**

Oleh

NADIA INTAN LESTARI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**Pada
Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

Judul Skripsi : **RESPON AUSTRALIA TERHADAP
PENINGKATAN KAPABILITAS MILITER
INDONESIA (2007 – 2017)**

Nama Mahasiswa : **Nadia Intan Lestari**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1516071084**

Jurusan : **Hubungan Internasional**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



Drs. Agus Hadiawan, M.Si
NIP 195801091986031002

Indra Jaya Wiranata, S.IP., M.A.
NIK 231704921219101

2. Ketua Jurusan Hubungan Internasional

Drs. Hi. Aman Toto, D.M.H

NIP.19570728 198703 1 006

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Drs. Agus Hadiawan, M.Si

Sekretaris : Indra Jaya Wiranata.S.IP.,M.A.

Penguji : Dr. Dedi Hermawan, S.Sos., M.Si



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Syarif Makhya

NIP. 19590803 198603 1 003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 21 Desember 2018



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMPUNG

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL

Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon: (0721) 704626 email: pshi@fisip.unila.ac.id. Laman: http://hi.fisip.unila.ac.id/

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan sebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 20 Desember 2018

Saya buat pernyataan,



Nadia Intan Lestari
1516071084

Catatan

Pernyataan ini diletakkan pada halaman setelah abstrak.

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis Nadia Intan Lestari. Lahir di Tangerang pada tanggal 08 Januari 1998 dan beragama Kristen Protestan. Penulis merupakan anak keempat dari enam bersaudara, dari pasangan Bapak Aspin Sihotang dan Ibu Elbine Situmorang.

Pendidikan formal yang ditempuh oleh penulis dimulai dari Sekolah Dasar di SDN 4 Cibeureum lulus di tahun 2009. Penulis menempuh Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Sejahtera 02 Cileungsi yang diselesaikan pada tahun 2012 dan menyelesaikan Pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Cileungsi pada tahun 2015.

Pada tahun 2015, penulis melanjutkan Pendidikan ke perguruan tinggi dan terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, penulis mengambil Jurusan Hubungan Internasional Program Studi Sarjana (S1).

MOTTO

“Man Proposes God Disposes.”

“When you cease to dream you cease to live.”

(Malcom Forbes)

PERSEMBAHAN

Ku persembahkan karya sederhana ini untuk

Kedua orang tuaku tercinta Bapak Aspin Sihotang dan Ibu Elbine
Situmorang

sebagai tanda bakti cinta dan kasihku,

serta Almamater tercinta

Universitas Lampung

SANWACANA

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya, serta kekuatan lahir batin kepada Penulis. Dengan berbekal keyakinan dan kemauan yang keras, maka Penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul **“Respon Australia Terhadap Peningkatan Kapabilitas Militer Indonesia (2007- 2017)”**. Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan Skripsi ini karena keterbatasan dan pengetahuan yang peneliti miliki. Melalui kesempatan ini, Penulis hendak mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moril, maupun spiritual.

Pada kesempatan ini, Penulis sampaikan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini antara lain, yaitu:

1. Bapak Dr.Syarief Makhya, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
2. Bapak Drs. Aman Toto Dwijoono, M.H., selaku Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
3. Bapak Dr. Dedi Hermawan,S.Sos.,M.Si., selaku Dosen Pembahas/Penguji yang telah memberikan kritik, saran dan telah membimbing saya agar menjadi lebih baik yang sangat berguna dalam penyusunan skripsi ini.

4. Bapak Drs. Agus Hadiawan, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Utama yang selalu memberikan motivasi, kritik dan saran, serta dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Indra Jaya Wiranata, S.IP., M.A., selaku Dosen Pembimbing Kedua Skripsi yang selalu meluangkan waktu dan sabar dalam membantu, membimbing, mengarahkan, memberikan semangat serta memberikan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh jajaran dosen dan staff Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung. Terimakasih atas dukungan dan pembelajaran selama menempuh perkuliahan, serta membantu dalam proses administrasi selama perkuliahan.
7. Kedua orang tuaku, Aspin Sihotang dan Elbine Situmorang, yang selalu memberikan dukungan, doa, cinta dan kasih sayang dengan tulus selama ini, semoga Tuhan senantiasa selalu melindungi serta memberikan kesehatan kepada kalian.
8. Saudara - Saudaraku, Silvia Domara, Yulia Larisa, Juni Fery Hamonangan, Mestaria Agustini dan Yohanes Teguh Mamahit yang telah memberikan semangat, dukungan serta doa dalam menyusun skripsi.
9. Erland Andreas Christofel Simamora, terima kasih atas semangat, dukungan dan waktu yang diberikan selama ini dalam penyusunan skripsi.
10. Sahabatku, Fatma Meidy, Ega Tiara dan Tirza (Icha) yang selalu menjadi tempat berbagi keluh kesahku selama di Universitas.
11. Kepada semua pihak yang telah mendoakan dan mendukung penulis dalam membentuk apapun, saya ucapkan terima kasih. Semoga Tuhan Yang Maha

Esa membalas semua kebaikan yang telah diberikan dalam membantu proses yang dijalani penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

BandarLampung, 27 Januari 2019.
Penulis

Nadia Intan Lestari

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GRAFIK.....	iv
DAFTAR SINGKATAN.....	v
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Kegunaan Penelitian.....	10
II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Penelitian Terdahulu.....	11
2.2 Landasan Konseptual.....	19
2.2.1 <i>Security Dilemma</i>	19
2.2.2 <i>Offense Defence Ballance</i>	22
2.2.3 Strategi	24
2.2.4 Respon	26
2.2.5 Rational Choice	25
2.3 Kerangka Pikir.....	27
III. METODE PENELITIAN.....	31
3.1 Jenis Penelitian.....	31

3.2 Fokus Penelitian.....	32
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	33
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	33
3.5 Teknik Analisis Data.....	34
IV. GAMBARAN UMUM.....	36
4.1 Kondisi Umum Australia.....	36
4.2 Kondisi Umum Indonesia.....	42
4.3 Dinamika Hubungan Indonesia – Australia.....	44
4.4 Peningkatan Kapabilitas Militer Indonesia.....	55
4.4.1 <i>Defense Budget Indonesia</i>	56
4.4.2 Kualitas dan Kuantitas Personil Militer.....	58
4.4.3 ALUTSISTA Indonesia.....	59
4.5 Analisis Kepentingan Australia Terhadap Indonesia.....	64
V. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	70
5.1 Peningkatan Kapabilitas Militer Australia.....	72
5.1.1 Peningkatan Anggaran Belanja Pertahanan.....	72
5.1.2 Peningkatan Kualitas & Kuantitas Personil Militer.....	76
5.1.3 Peningkatan ALUTSISTA.....	78
5.2 Tindakan Agresif Australia.....	82
5.3 Kerjasama Militer Indonesia – Australia.....	88
VI. KESIMPULAN DAN SARAN.....	96
6.1 Kesimpulan.....	98
6.2 Saran.....	99
6.3 Rekomendasi.....	97

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Kapabilitas Militer Indonesia (2007 – 2017).....	5
2. Peningkatan Personil Militer Indonesia (2007-2017).....	58
3. Jumlah Peningkatan ALUTSISTA Indonesia..... Tahun 2007 – 2017	60
4. Peningkatan Personil Militer Australia (2007-2017).....	77
5. Jumlah Peningkatan ALUTSISTA Australia..... Tahun 2007 – 2017.	80
6. Dinamika Konflik Indonesia – Australia.....	83

DAFTAR GRAFIK

Grafik	Halaman
1. Jumlah Anggaran Biaya Pertahanan Indonesia (2007 – 2017).....	4
2. Jumlah Anggaran Biaya Pertahanan Indonesia (2007-2017).....	56
3. Jumlah Anggaran Biaya Pertahanan Australia (2007-2017).....	74

DAFTAR SINGKATAN

AASAM	: <i>Australian Army Skill at Arms Meeting</i>
AD	: Angkatan Darat
AL	: Angkatan Laut
ALRI	: Angkatan Laut Republik Indonesia
ALUTSISTA	: Alat Utama Sistem Persenjataan
AU	: Angkatan Udara
AURI	: Angkatan Udara Republik Indonesia
CSF	: <i>Country Strategy Framework</i>
HANKAM	: Pertahanan dan Keamanan
KEMENKEU	: Kementerian Keuangan
KEMENLU	: Kementerian Luar Negeri
KTT	: Konferensi Tingkat Tinggi
MOU	: <i>Memorandum of Understanding</i>
MOTS	: <i>Military off the Sheft</i>
TNI	: Tentara Nasional Indonesia

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keamanan merupakan salah satu aspek terpenting yang terus diperhatikan oleh setiap negara. Keamanan dianggap penting karena keamanan merupakan fokus utama negara dalam menciptakan perlindungan negara terhadap berbagai ancaman sebagai tujuan dari kepentingan nasional. Pertimbangan ini semakin kompleks dengan adanya sistem internasional anarkhi yang telah membuat setiap negara berusaha untuk meningkatkan pertahanan dan keamanan negara untuk dapat bertahan didalam dunia internasional yang penuh dengan konflikktual. Kondisi konflikktual ini disebabkan oleh berbagai isu ancaman, mulai dari isu ancaman keamanan tradisional dan juga isu ancaman keamanan non tradisional yang menyebabkan setiap negara akan melakukan berbagai hal demi mencapai kepentingan nasionalnya.

Dalam perspektif realis, negara akan senantiasa mengejar *power*, karena *power* dipahami memiliki korelasi dengan keamanan negara. Upaya untuk senantiasa mengejar atau menyeimbangkan *power* di dalam dunia internasional menjadi arena yang tidak dapat dihindari. Negara akan senantiasa membangun kemampuan militer secara maksimal demi menjaga dan mempertahankan

keamanan serta kedaulatan nasionalnya agar mampu *survive* didalam kondisi dunia internasional yang anarkhi (Jhon dan Steven, 2001 : 303).

Peningkatan kapabilitas militer serta kerjasama merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan negara demi menciptakan keamanan nasional. Peningkatan kapabilitas militer suatu negara dapat dipengaruhi oleh faktor geografis , tingkat populasi, kemampuan ekonomi, stabilitas politik, kekuatan militer dan daya dukung sumber daya (Waltz, 1979 : 8).

Menurut perspektif realis dijelaskan bahwa peningkatan kapabilitas militer negara yang diwujudkan dengan peningkatan anggaran pertahanan, peningkatan jumlah alat utama sistem persenjataan, peningkatan kekuatan dan jumlah personil militer baik angkatan darat, laut ataupun udara serta pengembangan industri pertahanan negara dapat menimbulkan permasalahan diantara negara – negara disekitarnya, terutama negara – negara yang memiliki kedekatan secara geografis dan memiliki hubungan kurang baik.

Salah satu masalah yang muncul akibat peningkatan kapabilitas militer yang dilakukan negara adalah munculnya *security dilemma*. *Security dilemma* menjelaskan tentang suatu kondisi usaha suatu negara untuk meningkatkan keamanan nasional yang dilakukan dengan menambah kapabilitas militer berdampak pada munculnya rasa terancam terhadap negara lain, sehingga memicu ataupun memprovokasi negara tersebut untuk meningkatkan kemampuan pertahanannya juga (*military counter-moves*). Kondisi ini akhirnya menyebabkan menurunnya tingkat keamanan itu sehingga pada dasarnya *security dilemma* merupakan refleksi dari kesulitan pemerintah suatu negara untuk menentukan pilihan kebijakan keamanannya (Booth dan Wheeler, 2008 : 12).

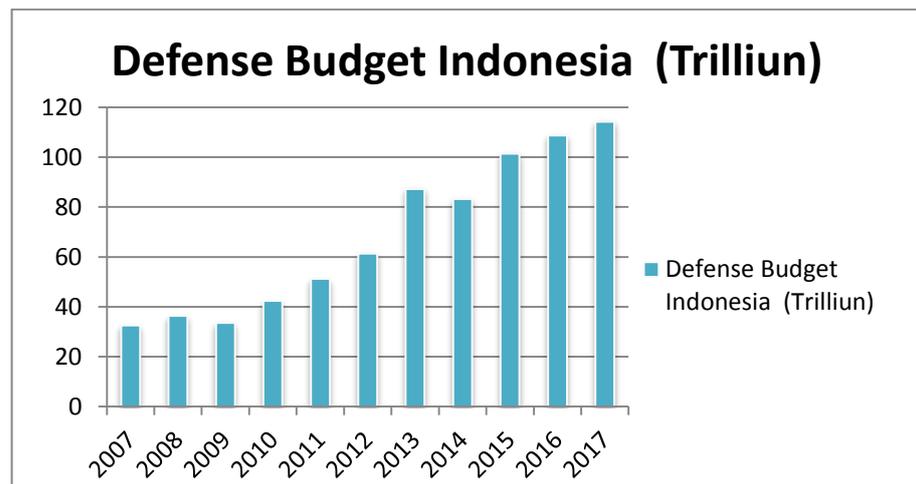
Kondisi *security dilemma* yang dialami negara dapat terjadi melalui dua hal yakni: pertama, ketika suatu negara mengurangi usaha-usaha untuk memperkuat keamanannya dengan tujuan menciptakan hubungan yang damai dengan negara lain, maka konsekuensinya adalah negara tersebut rawan untuk diserang oleh negara lain. Kedua, ketika suatu negara meningkatkan kekuatan pertahanannya maka akan menyebabkan munculnya prasangka atau kecurigaan negara-negara lain sehingga akan memicu terjadinya perlombaan senjata. Kondisi tersebut berlaku bagi setiap negara, termasuk salah satunya yang terjadi terhadap hubungan antara Australia dan Indonesia.

Australia dan Indonesia merupakan dua negara yang dilihat dari letak geografisnya ialah berdekatan. Selain itu, hubungan antara Indonesia dan Australia selama ini cenderung dinamis dari waktu ke waktu. Hal ini terlihat dari hubungan Indonesia terlihat begitu bersahabat, kooperatif dan saling mendukung pada suatu periode sedangkan pada periode lainnya, hubungan antar kedua negara ini penuh dengan konflik, saling curiga dan juga kurang bersahabat terutama akibat peningkatan kapabilitas militer yang dilakukan Indonesia.

Peningkatan kapabilitas militer yang dilakukan Indonesia melalui peningkatan anggaran biaya pertahanan, peningkatan ALUTSISTA, peningkatan kualitas dan kuantitas personil serta berbagai hal lainnya menjadi salah satu pemicu timbulnya rasa ancaman yang berujung pada kondisi dilema keamanan yang dialami oleh Australia. Bentuk adanya peningkatan kapabilitas militer yang dilakukan pemerintah terlihat dengan adanya peningkatan anggaran biaya pertahanan yang akan digunakan sebagai komponen utama dalam setiap bentuk peningkatan yang dilakukan baik untuk pembelian ALUTSISTA, pelatihan bagi

setiap personil militer ataupun pembangunan industri pertahanan negara. yang terlihat melalui diagram peningkatan anggaran belanja pertahanan Indonesia dari tahun 2007 -2017 dibawah ini .:

Diagram 1 : Jumlah Anggaran Biaya Pertahanan Indonesia Tahun 2007 – 2017



Sumber : Diolah dari lampiran anggaran biaya pertahanan Kemenkeu 2017

Data yang tertera pada diagram di atas merupakan jumlah peningkatan yang terus dilakukan Indonesia mulai dari tahun 2007 yang dimana pemerintah Indonesia mulai meningkatkan *defense budgetnya* menjadi 32,6 triliun kemudian pada tahun 2008 meningkat menjadi 36,39 triliun. Walaupun pada tahun 2009, angka tersebut menurun menjadi 33,6 triliun , namun pada tahun 2010, anggaran biaya pertahanan Indonesia meningkat kembali menjadi 42,4 triliun dan semakin meningkat pada tahun 2011 menjadi 51,2 triliun. Angka *defense budget* Indonesia pun semakin tinggi , diawali dari tahun 2012 sebesar 61,3 triliun dan meningkat cukup signifikan pada tahun 2013 sebesar 87,7 triliun walaupun ditahun 2014 mengalami penurunan sebesar 83,3 triliun. Setelah mengalami penurunan terkait *defense budget* pada tahun 2014, pemerintah Indonesiapun semakin menyadari pentingnya peningkatan terhadap *defense budget* untuk pertahanan dan keamanan

negara sehingga pada tahun 2015 kembali meningkat menjadi 101,4 triliun dan semakin meningkat pada tahun 2016 sebesar 108,7 triliun hingga pada tahun 2017 sebesar 114,2 triliun yang dimana membuat *defense budget* Indonesia mulai menyaingi Australia.

Peningkatan kapabilitas militer yang dilakukan Indonesiapun tidak hanya dilakukan melalui peningkatan anggaran biaya pertahanannya setiap tahun, namun juga ditunjukkan melalui tingginya jumlah populasi penduduk, personel militer serta tingginya perkembangan modernisasi ALUTSISTA tentara Indonesia baik di udara, laut dan darat yang dapat terlihat melalui tabel dibawah ini :

Tabel 1. Jumlah Kapabilitas Militer Indonesia (2007 – 2017)

Military Capability	Total
Total Population	258.123.435
Total Millitary Personel	398.870
Total Aircraft Strength	991
Total Navy Strength Assets	221
Total Army Strength	2163
Anggaran Modernisasi ALUTSISTA Indonesia	156 Triliun

Sumber : Diolah dari Global Fire Power ,2017

Data yang tertera di atas merupakan penjumlahan dari setiap bentuk peningkatan akan kapabilitas militer yang dilakukan Indonesia dari tahun 2007 – 2017 yang dilakukan melalui peningkatan jumlah penduduk, peningkatan jumlah dan kualitas dari personel militer Indonesia baik didarat, laut ataupun udara. Kemudian peningkatan jumlah ALUTSISTA baik di udara , laut dan juga udara serta jumlah total anggaran biaya modernisasi setiap ALUTSISTA Indonesia sampai pada tahun 2017.

Aksi yang dilakukan Indonesia melalui peningkatan kapabilitas militer inilah yang mendapat respon dari Australia yang dimana Australia merespon hal tersebut dengan melakukan tindakan agresif dengan melakukan penyadapan besar – besaran terhadap pemerintah Indonesia yang dengan waktu yang sama sebagai salah satu bentuk *security dilemma* yang dialami oleh Australia. Hal inilah yang pada akhirnya membuat hubungan Indonesia dengan Australia menjadi memburuk seperti misalnya pada saat Indonesia berada dimasa kepemimpinan Perdana Menteri John Howard dan Presiden BJ Habibie ataupun di era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Perdana Menteri Tony Abot yang dimana Australia diketahui melakukan penyadapan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan para menteri sejak tahun 2007 yang berujung kepada penarikan sementara Duta Besar Indonesia dari Australia dan menghentikan kerja sama dengan Australia dalam kebijakan pengaturan pengungsi (BBC Indonesia, 4 Mei 2015).

Kemudian, insiden pelanggaran teritorial yang dilakukan kapal perang Australia yang masuk kedalam wilayah perairan Indonesia tanpa izin pada tahun 2014 (Sydney Morning Herald, 18 Januari 2014). Hubungan antar kedua negara menjadi semakin ricuh pada bulan April 2015 ketika Presiden Indonesia Joko Widodo mengabaikan permintaan dari Australia untuk memberikan grasi kepada terdakwa pengedar narkoba Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, yang kemudian akhirnya dihukum mati. Hal tersebut membuat dunia Internasional mengecam keras Indonesia karena hukuman mati tersebut. Terutama dari Australia sendiri yang sangat mengecam pelaksanaan hukuman mati tersebut yang

membuat Australia menarik duta besarnya dari Indonesia pada tahun 2015 (BBC Indonesia, 16 April 2016).

Dilema keamanan yang dialami Australiapun semakin terlihat dengan terjadinya fenomena kekalahan Australia dalam perlombaan *Australian Army Skill at Arms Meeting (AASAM)* yang digelar di Victoria pada tahun 2015 yang dimenangkan oleh Indonesia selama 8 tahun berturut-turut sehingga membuat Australia ingin sekali mengetahui senjata senapan yang digunakan Indonesia serta ketika Indonesia membeli 10 pesawat jet tempur Su-35 Rusia dan 3 kapal selam dari Korea Selatan yang direson Australia dengan pembelian kapal selam melalui program *Military off the Shelf (MOTS)* yang dinamai *SEA 1000 Project* pada tahun 2016 (Australian Government Department of Defense, 2017).

Berbagai data di atas menjadi salah satu bukti adanya dampak kecil dari *security dilemma* yang dialami Australia terhadap peningkatan kapabilitas militer Indonesia. *Security dilemma* memang kerap kali menimbulkan dampak negatif yang kerap kali berujung pada konflik diantara kedua negara tersebut yang membuat kesenjangan terhadap hubungan kedua negara, namun dalam hal ini seperti yang dikemukakan oleh Robert Jervis bahwa *security dilemma* dapat diatasi dengan dua cara, yakni dengan *offensive realism* atau *deffensive realism*.

Dalam hal ini, ketika suatu negara merespon dengan *offensive* maka hal yang dilakukan adalah munculnya perlombaan persenjataan, tindakan agresif dan rasa curiga terhadap negara lainnya bahwa peningkatan kapabilitas militer yang dilakukan merupakan suatu ancaman. Sedangkan jika suatu negara merespon dengan *deffensive realism* maka kedua negara tersebut cenderung akan melakukan kerjasama karena *deffensive realism* memandang bahwa untuk memitigasi dilema

keamanan dapat dilakukan dengan mengurangi *misspersepsi*, menghindarkan diri dari perlombaan senjata, serta mencegah konflik diantara negara untuk lebih mempererat hubungan antara dua negara dengan bergerak dari suatu langkah meredakan intensitas dilema keamanan, kearah bentuk kerjasama yang lebih tinggi (Tang, 2010 : 122).

Penelitian ini menjadi menarik untuk dibahas karena , kondisi *security dilemma* yang biasanya berujung pada aksi ofensif dalam menghindari ancaman justru dalam hubungan antara Australia ditengah peningkatan kapabilitas militer yang dilakukan Indonesia selama bertahun – bertahun dan berbagai fenomena konflik yang terjadi antara dua negara tersebut. Australia lebih memfokuskan strategi keamanannya terhadap kerjasama militer dan pertahanan dengan Indonesia. Hal ini terbukti melalui laporan *defense white paper* Australia pada tahun 2016 dengan menyatakan :

“Australia will build on the strong foundation of our defence relationship to support Indonesia as it modernises its defence forces. Opportunities for more sophisticated training will become available as this happens. We will continue to deepen our defence partnership with Indonesia through: navy, army and air force cooperation; expanding our comprehensive pattern of training, exercises, and operations; more frequent policy and planning dialogue; and intelligence exchanges. Recent activities have included navy, army and air force exercises and training, including counter-terrorism exercises, and enhancing defence industry cooperation. Our joint efforts to increase cooperation will continue in 2016, including a new joint humanitarian assistance and disaster relief exercise.”

Selain itu, penelitian ini juga menarik untuk dibahas untuk menciptakan perdamaian dunia dan meminimalisir konflik yang terjadi antara Indonesia dan Australia.

1.2 Rumusan Masalah

Respon Australia terhadap peningkatan kapabilitas militer yang dilakukan oleh Indonesia ternyata ditunjukkan Australia dengan bentuk strategi keamanan yang berfokus kepada tindakan defensif dan kooperatif. Kondisi ini berbeda sekali dengan karakter ofensif Australia yang pada umumnya muncul dalam menghadapi berbagai tantangan dan ancaman dari berbagai negara dikawasan Asia Tenggara dan Asia Pasifik.

Berdasarkan hal yang telah dipaparkan dalam latar belakang kondisi dua negara tersebut pada tahun 2007 – 2017 menjelaskan bahwa sifat dan respon yang dilakukan Australia terhadap peningkatan kapabilitas militer Indonesia berujung kepada kerjasama yang defensif dan kooperatif . Hal ini sangat berbeda dengan konsep realis yang mengatakan bahwa dalam kondisi yang anarkhi negara akan berada pada kondisi *competition* dan *self help* yang berujung kepada dilema keamanan yang cenderung bersifat ofensif . Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan diatas penulis mencoba untuk menganalisis yang fokus pertanyaannya adalah : **“Bagaimana respon pemerintah Australia terhadap peningkatan kapabilitas militer Indonesia pada tahun 2007 - 2017?”** terkhusus pada aspek keamanan militer.

1.3 Tujuan Penelitian

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis respon yang dilakukan pemerintah Australia dalam menanggapi peningkatan kapabilitas militer Indonesia serta untuk melihat bagaimana komparasi kapabilitas militer antara Australia dengan Indonesia pada tahun 2007 – 2017.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis penelitian ini digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya untuk mata kuliah Keamanan Internasional dalam Jurusan Hubungan Internasional.
2. Secara praktis sebagai bahan informasi publik bagi pihak yang memerlukan data mengenai perkembangan kerja sama Indonesia – Australia 2007 – 2017.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Berbagai penelitian mengenai strategi keamanan Australia dalam menghadapi peningkatan kapabilitas militer Indonesia di era kontemporer saat ini telah banyak dilakukan oleh berbagai akademisi Hubungan Internasional ataupun ilmu sosial politik lainnya. Umumnya, berbagai penelitian yang ada lebih memfokuskan kepada dinamika hubungan keamanan yang terjadi antara Australia dengan Indonesia serta kebijakan yang digunakan Australia dalam menghadapi berbagai ancaman baik ancaman dari keamanan tradisional maupun ancaman keamanan non tradisional. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya perhatian para akademis dalam melihat setiap strategi keamanan yang dilakukan negara dalam menghadapi dinamika sosial politik yang terjadi di sistem internasional yang anarkhi ini.

Tinjauan pustaka dalam penelitian ini akan melihat terkait berbagai analisis dari berbagai publikasi, baik berupa buku, jurnal, maupun penelitian ilmiah, yang telah dilakukan sebelumnya dari berbagai perspektif, khususnya dengan memperhatikan dinamika eksternal ataupun sistem internasional negara Australia terhadap strategi keamanan nasional.

Tema penelitian yang sama tentang respon Australia terhadap peningkatan kapabilitas militer Indonesia telah dilakukan sebelumnya oleh Siti Muti'ah Setyawati dan Dafri Agus Salim, seorang dosen di Departemen Hubungan Internasional pada Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. Penelitian Siti dan Dafri berjudul *Security Complex Australia – Indonesia dan Pengaruhnya Terhadap Dinamika Hubungan Kedua Negara Tersebut*, penelitian yang dilakukan tersebut berfokus pada pola dinamika hubungan dalam aspek *amity* (aspek kerjasama) dan aspek *enmity* (permusuhan atau konflik) yang terjadi kepada Australia dan Indonesia.

Berdasarkan penelitian tersebutpun Siti dan Dafri mencoba untuk menganalisis terkait hal – hal yang menjadi faktor penyebab memicunya konflik yang terjadi di antara Australia dan Indonesia terkhusus dalam hal keamanan diantara kedua negara tersebut dan juga mereka mencoba menganalisis terkait langkah dan kebijakan yang dilakukan oleh Australia dan Indonesia dalam menghadapi konflik diantara dua negara tersebut.

Siti dan Dafri kemudian melakukan analisis dengan membandingkan terkait keunggulan pola hubungan antara Australia dan Indonesia antara aspek *amity* dengan *enmity*. Adapun analisis penelitian yang dilakukan oleh Siti dan Dafri menggunakan penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan interpretif yang berguna dalam menganalisis permasalahan yang menjadi fokus penelitian dan pendekatan behavioralisme dengan melakukan pengumpulan data – data yang akan diamati dan diukur (*observable and measurable data*).

Hasil dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut : (1) Dilihat dari aspek sejarah, hubungan Indonesia – Australia memiliki sisi *amity* dan *enmity* yang cukup kuat, dengan aspek *enmity* yang menonjol. Pada sisi *amity* telah muncul dan berkembang setelah Indonesia berjuang mendapat kemerdekaannya yang didukung oleh Australia dalam menyingkirkan belanda.

Aspek *enmity* dapat terjadi karena adanya hal – hal yang dikhawatirkan oleh Australia terhadap serangan militer dari Indonesia mengingat politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif telah menghalangi Indonesia untuk membangun aliansi militer dengan formal, infiltrasi teroris muslim mengingat mayoritas penduduk Indonesia yang beragama muslim dan masuknya para pengungsi dari Papua dan wilayah konflik lain di Indonesia karena kedekatan letak geografis diantara kedua negara tersebut. (2) Dengan berbagai banyaknya ancaman dan kekhawatiran yang dialami Australia terhadap Indonesia, maka salah satu langkah yang dilakukan Australia adalah membangun kerjasama dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya dan tentunya militer dengan Indonesia sebagai bentuk upaya pencegahan dalam menjaga dan mempertahankan stabilitas keamanan nasional Australia.

Penelitian lain dengan tema yang sama ditulis oleh Muhammad Imam, seorang mahasiswa Hubungan Internasional pada Universitas Riau, Pekanbaru. Penelitian Imam berjudul *Strategi Australia Memasukkan Indonesia ke dalam Buku Putih Pertahanan (Defence White Paper) 2013*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Siti dan Dafri, penelitian ini berfokus kepada pola strategi keamanan yang dilakukan oleh Australia terhadap potensi yang dimiliki oleh Indonesia dari segi keamanan.

Berdasarkan fokus tersebut, maka penelitian yang dilakukan oleh Imam bertujuan untuk mencoba untuk menganalisis terkait hal – hal yang menjadi penyebab Australia mengidentifikasi Indonesia kedalam mitra strategis dalam buku putih pertahanan Australia, selain itu penulis juga menganalisis terkait kebijakan yang dilakukan Australia dalam membangun kerjasama pertahanan keamanan dengan Indonesia.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif dalam menganalisis terkait upaya strategi keamanan Australia yang dapat mempengaruhi tatanan pertahanan dan keamanan nasional Australia terhadap pembangunan mitra dengan Indonesia sesuai dengan buku putih pertahanan Australia 2013.

Hasil dari penelitian Imampun menjelaskan bahwa : (1) Alasan utama Australia memasukan Indonesia sebagai mitra strategis didalam buku putih pertahanan Australia 2013 adalah karena Indonesia memiliki potensi dan posisi yang strategis, populasi yang besar dan ekonomi yang berkembang pesat sebagai satu kekuatan utama dunia, dan juga sebagai pimpinan wilayah Asia Tenggara yang memiliki pengaruh global dan peran yang berkembang pesat dalam forum internasional. (2) Strategi Australia memasukkan Indonesia ke dalam Buku Putih Pertahanan (*Defence White Paper*) 2013 adalah sebagai upaya untuk mencegah ancaman yang datang ke Australia serta menjaga kestabilan keamanan nasionalnya dengan membangun hubungan strategis dengan Indonesia. (3) Adanya rasa kekhawatiran Australia terhadap *power military* Indonesia yang kian berkembang dibandingkan dengan negara – negara kawasan lainnya di Asia Tenggara.

Penelitian dengan tema yang sama ditulis oleh Guy Wilson yang merupakan seorang *vice chief of defence force* Australia dengan penelitiannya yang berjudul *Defence diplomacy: the right ballast for Australia's fragile relations with Indonesia*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lainnya, penelitian ini memfokuskan penelitiannya terhadap upaya – upaya dari *defence diplomacy* yang dilakukan Australia dalam memperbaiki hubungan dengan Indonesia akibat banyaknya konflik yang terjadi antara Australia dan Indonesia. Berdasarkan fokus tersebut, maka peneliti melakukan analisis dalam hal bentuk – bentuk kebijakan yang dilakukan Australia dalam memperbaiki citra Australia di mata Indonesia dan membangun hubungan yang baik dengan Indonesia dengan banyaknya konflik dan kesalahpahaman yang terjadi diantara dua negara tersebut.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian sejarah secara kritis yang terdiri dari beberapa tahapan. Tahapan pertama adalah menentukan topik penelitian, tahapan kedua adalah heuristik atau pengumpulan sumber. Tahap ketiga adalah verifikasi atau kritik sumber. Tahap keempat adalah interpretasi atau penafsiran fakta-fakta sejarah yang ditemukan. Tahap terakhir adalah historiografi atau penulisan sejarah.

Hasil penelitian yang didapat dari Guy Wilson adalah menjelaskan bahwa dengan banyaknya kasus ataupun konflik – konflik yang terjadi antara Indonesia dan Australia seperti konflik penyadapan terhadap pemerintah Indonesia pada tahun 2007, insiden pelanggaran teritorial yang dilakukan kapal perang Australia yang masuk kedalam wilayah perairan Indonesia tanpa izin pada tahun 2014,

pemberian hukuman mati yang dilakukan Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden Jokowi kepada dua orang pengedar narkoba asal Australia yang membuat Indonesia harus dikecam dunia internasional akibat pelaporan yang dilakukan Australia pada tahun 2015, tindakan Australia yang membayar imigran asal Bangladesh, Sri Lanka dan Myanmar untuk membawa kembali kapal ke wilayah Indonesia dan juga penghinaan pancasila yang dilakukan oleh militer Australia yang membuat merengangnya hubungan antara kedua negara tersebut membuat Australia memperbaharui kebijakan dan strategi negaranya dengan melakukan berbagai tindakan *defence diplomacy* seperti pemberian bantuan ekonomi, inisiasi kerjasama pertahanan keamanan melalui berbagai program dan kebijakan seperti penandatanganan *Agreement on Framework for Security Cooperation* yang lebih dikenal dengan Traktat Lombok, serta berbagai program pertukaran budaya untuk meretorasi dan memperbaiki hubungan bilateral diantara kedua negara tersebut.

Penelitian lainnya yang memiliki tema yang samapun yang dilakukan oleh Ishna Indika yang merupakan seorang mahasiswi asal Universitas Parahyangan, Bandung dengan penelitiannya yang berjudul *Kerjasama Pertahanan : Studi Kasus Kerjasama Indonesia – Australia dalam Mengatasi Keterbatasan Militer*. Penelitian ini berfokus kepada hubungan kerjasama militer yang terjadi diantara dua negara tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas militer masing – masing negara.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian studi kasus yang dilakukan dengan berbagai tahapan seperti tahapan pertama adalah penentuan topik, tahapan kedua adalah menentukan studi kasus,

tahapan ketiga adalah penentuan teori untuk mengkonstruksi mengenai kasus yang dibahas, kemudian dilanjutkan dengan tahapan keempat yang adalah prosedur pengumpulan data dan yang terakhir yaitu tahapan menganalisis data yang ada berdasarkan teori yang sesuai.

Hasil dari penelitian ini sangat berbeda dengan peneliti – peneliti lainnya karena hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan kerjasama yang dilakukan antara Indonesia dan Australia hanyalah berfokus kepada kunjungan, pertemuan, latihan militer bersama, sehingga tidak sesuai dengan tujuan awal Indonesia untuk bekerjasama demi mendapatkan peningkatan akan kapabilitas militernya dan hal ini dapat terjadi karena banyak faktor dari dinamika hubungan bilateral diantara dua negara tersebut yang membuat kerjasama ini cenderung tidak efektif.

Berbagai *literature review* hubungan Australia dan Indonesia telah banyak dilakukan sebelumnya dengan berbagai konsep yang berbeda seperti *security complex*, *cooperative security*, *defence diplomacy* dan teori neorealisme. Terlihat bahwa ada beberapa kemiripan dengan penelitian yang telah ditulis, namun penelitian ini mempunyai perbedaan yang mendasar dengan penelitian sebelumnya yakni penelitian ini memfokuskan terkait bentuk strategi yang digunakan Australia dalam merespon peningkatan kapabilitas militer Indonesia (2007 – 2017) selain itu perbedaan konsep dan tahun pada penelitian ini juga menjadi dasar perbedaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya.

Penelitian Terdahulu	Siti Muti'ah Setyawati dan Dafri Agussalim	Muhammad Imam	Guy Wilson	Ishna Indika	Penulis
Topik Penelitian	<i>Security Complex</i> Australia – Indonesiadan Pengaruhnya Terhadap Dinamika Hubungan Kedua Negara Tersebut	Strategi Keamanan Australia Memasukkan Indonesia kedalam Buku Putih Pertahanan (<i>Defence White Paper</i>) 2013	<i>Defence diplomacy: the right ballast for Australia's fragile relations with Indonesia</i>	Kerjasama Pertahanan : Studi Kasus Kerjasama Indonesia – Australia dalam Mengatasi Keterbatasan Militer.	Respon Australia Terhadap Peningkatan Kapabilitas Militer Indonesia (2007-2017)
Objek Penelitian	Pola <i>amity</i> dan <i>enmity</i> Australia – Indonesia	Faktor penyebab dijadikannya Indonesia sebagai mitra strategis	Upaya yang dilakukan dalam memperbaiki citra Australia terhadap berbagai konflik yang terjadi di antara dua negara tersebut	Bentuk kerjasama militer Australia – Indonesia dan dampaknya.	Strategi Keamanan Nasional Australia
Metode Penelitian	Pendekatan Kualitatif	Pendekatan Kualitatif	Pendekatan kualitatif	Pendekatan kualitatif	Pendekatan Kualitatif
Teori dan Konsep	<i>Security Complex</i>	<i>Cooperative security</i>	<i>Defence diplomacy</i>	<i>Neorealisme</i>	<i>Security Dillema</i> dan <i>Offense Defense Ballance</i>
Hasil analisis	Hubungan Australia dan Indonesia lebih unggul kedalam aspek <i>enmity</i> yang dimana berawal dari kekhawatiran Australia terhadap berbagai ancaman dari Indonesia seperti peningkatan kapabilitas militer dan infiltrasi terorisme muslim.	Alasan Australia menjadikan Indonesia sebagai mitra strategis adalah karena Indonesia memiliki potensi dan posisi yang strategis didalam forum internasional dan juga untuk mencegah berbagai ancaman yang datang dari Indonesia	Kerjasama militer , ekonomi dan kebudayaan merupakan salah satu cara defensif diplomasi yang dilakukan Australia demi memperbaiki citra Australia dimata Indonesia serta untuk mencegah konflik yang berkelanjutan.	Kerjasama militer yang dilakukan Australia terhadap Indonesia cenderung tidak efektif karena hanya sekedar kunjungan, pertemuan, latihan militer bersama, sehingga tidak sesuai dengan tujuan awal Indonesia.	Arah strategi keamanan Australia terhadap peningkatan kapabilitas militer yang dilakukan Indonesia cenderung defensif dan kooperatif.

2.2 Landasan Konseptual

Berbagai penelitian yang ada, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam tinjauan pustaka terkait dengan adanya sistem internasional yang anarkhi dan berbagai faktor eksternal lainnya akan mempengaruhi terkait strategi keamanan yang akan dilakukan oleh setiap negara seperti pola strategi keamanan Australia dalam merespon peningkatan kapabilitas militer yang dilakukan Indonesia. Namun hal ini tentu saja direspon Australia adalah dengan melakukan peningkatan intensitas defensif dan kooperatif dengan Indonesia. Oleh karena itu penulis menganalisis hal ini dengan menggunakan berbagai konsep dan teori yang mampu untuk menjelaskan terkait peningkatan defensif Australia ditengah kekhawatiran akan ancaman Australia dari peningkatan kapabilitas militer yang dilakukan Indonesia yaitu, konsep *security dilemma* dan *offense defense ballance* dan *strategy*.

2.2.1 Konsep Security Dilemma

Dalam penelitian ini teori *security dilema* digunakan penulis sebagai teori utama yang menjelaskan terkait hal yang menjadi penyebab akan adanya hubungan yang lebih mengarah kepada defensif dan kooperatif antara Australia terhadap Indonesia.

Konsep *security dilemma* pertama kali dicetuskan oleh John H Herz dalam bukunya yang berjudul *Idealist Internationalism and the Security Dilemma*. Dilema keamanan atau *security dilemma* dalam Hubungan Internasional adalah “gagasan struktural di mana upaya-upaya yang diambil oleh sebuah negara untuk menjaga kebutuhan keamanannya sendiri, terlepas dari apapun niatnya, cenderung memicu ketidaknyamanan bagi negara-negara lainnya, terutama negara

yang berada di sekitarnya, karena masing-masing negara (yang mengambil tindakan tersebut) menganggap bahwa tindakan yang diambilnya hanyalah bersifat defensif dan tindakan yang diambil negara lain bersifat mengancam (Herz, 1950: 171 – 201).

Menurut Herz terdapat beberapa hal yang menjadi faktor utama munculnya *security dilemma* yang meliputi : (1) kondisi anarkhi sebagai sumber utamanya (2) kondisi tersebut memunculkan ketidakpastian dan ketakutan atas potensi setiap negara untuk melakukan kejahatan (3) negara – negara mencoba keluar dari dilema keamanan dengan *self help* yang mendorong terciptanya siklus kompetisi kekuatan (4) akumulasi kekuatan tersebut cenderung mempekeruh keadaan (5) dilema keamanan dapat merupakan penyebab perang, namun bukan berarti semua perang disebabkan oleh *security dilemma* (Tang, 2010: 35).

Perkembangan konsep *security dilemma* juga mendapat kontribusi melalui Herbert Butterfield dan Robert Jervis, yang dimana pemikiran Butterfield pada awalnya ditujukan untuk menjelaskan terjadinya perang, konflik serta perlombaan senjata yang terjadi di masa perang dunia, sehingga Butterfield berpendapat bahwa perang ataupun konflik merupakan akibat dari *fear* dan *uncertainty* yang dimiliki manusia termasuk negara yang menjadikan dilema keamanan terjadi didalamnya. Menurut Butterfield terdapat enam aspek yang menjadi faktor terjadinya konflik yang meliputi : (1) adanya rasa takut yang berasal dari *universal sin of humanity* (2) adanya ketidakpastian suatu pihak mengenai niat pihak lain (3) pada dasarnya tidak ada tujuan untuk membuat kerusakan (4) dilema keamanan menyebabkan terjadinya hal – hal tragis (5) faktor psikologis

dapat memperkeruh dilema keamanan (6) serta pendorong terjadinya semua konflik di umat manusia (Tang, 2010: 35 – 38).

Sedangkan menurut Robert Jervis justru menjelaskan bahwa *security dilemma* dapat terjadi karena adanya permasalahan struktural yang menjadi dasar terjadinya dilema keamanan serta ketidakpastian dan ketakutan yang dimiliki negara baik dimasa saat ini dan masa depan sangat menentukan keberlangsungan dilema keamanan yang dimana disebabkan oleh aksi defensif negara yang tanpa disengaja mendorong terjadinya konflik, meski demikian Jervis juga menjelaskan bahwa *security dilemma* dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti material / fisik ataupun faktor psikologi (Jervis, 1978 : 167 – 174).

Security dilemma sebagai suatu keadaan atau situasi di mana tindakan yang diambil oleh negara yang memperkuat sistem pertahanan dan keamanannya, seperti meningkatkan kekuatan militer atau pun membentuk aliansi dengan negara lain. Tindakan tersebut dapat menyebabkan negara-negara lain, terutama negara tetangga yang berada di sekitarnya, menanggapi tindakan tersebut dengan tindakan/langkah serupa. Hal tersebut kemudian akan mampu meningkatkan ketegangan hingga terciptanya konflik, terutama di suatu kawasan internasional.

Dari penjelasan terkait konsep *security dilemma* di atas akan digunakan dalam menganalisis terkait kondisi hubungan yang terjadi antara Australia dan Indonesia serta digunakan untuk alat analisis dalam memahami pola aksi reaksi yang terjadi diantara dua negara tersebut dalam mengetahui kondisi *security dilemma* yang dialami Australia akibat peningkatan kapabilitas militer yang dilakukan oleh Indonesia.

2.2.2 Konsep *Offense – Defence Balance*

Konsep *offense – defence ballance* yang dipaparkan oleh Stephen Van Evera menjelaskan bahwa dengan adanya *security dilemma* yang didefinisikan sebagai suatu fenomena aksi dan reaksi antara beberapa negara di mana tindakan suatu negara untuk meningkatkan keamanannya akan berakibat atau dianggap melemahkan keamanan negara lainnya maka hal yang perlu ditekankan adalah mengenai keseimbangan *offense-defense* yang dimana apabila *offense* mendominasi maka *security dilemma* akan meningkat, lalu diikuti oleh perlombaan senjata, dan pada akhirnya perang atau konflik. Oleh karena itu, perang ataupun konflik dapat dicegah apabila *defense* dapat mengungguli dominansi *offense* yang dimana akan berujung kepada tindakan defensif dan kooperatif yang lebih mengarah ke kerjasama diantara dua negara tersebut (Steven, 1998 : 6).

Penjelasan di atas terkait konsep *offense – defence balance* secara umum dapat dijelaskan bahwa secara relatif faktor – faktor material yang meliputi militer , sosial , geografi dan diplomatik mempengaruhi operasi militer secara ofensif dan defensif serta mempengaruhi potensi krisis dan terjadinya perang dalam sistem internasional .

Teori *offense-defense* menawarkan sebuah pandangan baru dalam politik internasional yang didasari pada argumen bahwa, perang dapat dicegah ketika *defense* mendapatkan keuntungan atas *offense* dalam skema *offense-defense balance*. Van Evera berargumen bahwa perang akan terjadi apabila *conquest* mudah dilakukan, dan terjadi pergeseran keseimbangan dalam *offense defense* yang dapat memperbesar risiko pecahnya perang. Van Evera juga menjelaskan

setidaknya ada sepuluh penyebab perang jika *offense* mendominasi keseimbangan di sebuah kawasan. 1. Apabila negara-negara mudah untuk dikuasai, situasi ini akan membuka kesempatan untuk melakukan ekspansi, bahkan bagi negara dengan kekuatan menengah sekalipun; 2. *Self-defense* sulit, sehingga negara menjadi semakin *insecure*. Situasi ini mendorong mereka untuk memperkuat diri dengan cara defensif; 3. Rasa *insecure* negara juga mendorong mereka untuk menolak ekspansi negara lain dengan cara yang lebih keras. Peningkatan kekuatan oleh negara lain dapat mengancam keamanan nasional negara sendiri, sehingga bukan tidak mungkin *expansionism* dapat melahirkan respon yang lebih keras; 4. Kesempatan bagi negara sebagai penyerang pertama terbuka, menambah resiko terjadinya *preemptive war*; 5. Jendela kesempatan dan kerentanan lebih besar, meningkatkan bahaya perang *preventif*; 6. Negaranegara tidak kooperatif, sehingga negosiasi sering gagal dan perselisihan/sengketa sulit diakhiri; 7. Negara-negara menaruh kebijakan luar negeri dan pertahanan dalam kerahasiaan yang ketat, meningkatkan risiko salah perhitungan dan diplomatic blunder; 8. Perlombaan persenjataan terjadi begitu cepat sehingga lebih sulit untuk dikontrol ; 9. *Offense dominance is self-feeding*, yang dimana bila *conquest* semakin mudah, maka negara akan mengadopsi kebijakan - kebijakan yang lebih mempermudah (sebagai contoh, kebijakan militer yang lebih offensif) mereka untuk melakukan conquest.

Konsep realisme dengan pendekatan defensif menawarkan bahwa agar negara terhindar dari konflik maka hal yang dapat dilakukan adalah mengurangi *misspersepsi* dan menghindari perlombaan senjata. Sehingga negara – negara akan

cenderung mempererat hubungan antarnegara yang berujung pada kerjasama guna meredam dan memitigasi intensitas dilema keamanan (Tang, 2010 : 122).

Konsep *offense – deffense balance* akan digunakan penulis untuk menganalisis terkait bentuk reaksi dan respon yang cenderung dilakukan Australia dalam mengatasi kondisi dilema keamanan yang dialami Australia terhadap peningkatan kapabilitas militer yang dilakukan Indonesia yang dapat dilihat melalui tindakan – tindakan yang dilakukan Australia ataupun kebijakan – kebijakan yang dikeluarkan Australia terhadap Indonesia.

2.2.3 Konsep Strategi

Konsep strategi keamanan dalam konteks militer telah dikenal sejak awal negara modern lahir, berbagai pemikir perang terdahulu seperti Clausewitz , De Jomini menjelaskan terkait bagaimana menyusun strategi yang baik dan tepat . Namun seiring perkembangan zaman, konsep strategi juga mendapat kontribusi dari pemikir lain seperti Collin Gray yang menjelaskan strategi adalah jembatan yang menghubungkan antara militer dan tujuan politik suatu negara (Gray, 1992 : 228 – 272).

Penjelasan lain muncul dari Edward Mead Erle yang memperkenalkan istilah *grand strategy* yang meliputi kebijakan negara yang luas yang menyangkut keamanan, rangkaian dari tujuan politik dan militer sebagai suatu keseluruhan terkait rencana negara dalam menjaga keamanannya dengan mempertahankan sumber daya nasional dan komitmen eksternal sehingga dianggap sebagai suatu kebijakan untuk meningkatkan kekuatan nasional dan keamanan nasional. *Grand strategy* atau yang selanjutnya akan disebut strategi merupakan salah satu konsep strategi yang relevan dengan kondisi saat ini.

Selain itu, menurut Collin Dueck dijelaskan bahwa strategi mencakup rancangan aplikasi penggunaan kekuatan dan sumber daya untuk mencapai tujuan nasional, Colin menjelaskan bahwa *strategy* mencakup tiga hal yang meliputi : (1) kepentingan, sasaran, dan tujuan akhir nasional (2) ancaman potensial terhadap kepentingan tersebut (3) sumber daya yang dibutuhkan untuk menghadapi ancaman dan mencapai kepentingan nasional .

Penjelasan di atas menyimpulkan bahwa strategi merupakan suatu aspek kebijakan yang didasarkan atas tindakan rasional negara dalam mencapai kepentingan nasionalnya yang dimana penjelasan mengenai strategi ini akan digunakan penulis dalam menganalisis strategi yang meliputi seperti kebijakan dan tindakan – tindakan defensif lainnya yang dilakukan Australia terhadap setiap peningkatan kapabilitas militer yang dilakukan oleh Indonesia yang terlihat cenderung defensif dan cooperative ditengah peluang peningkatan intensitas ancaman yang terjadi terhadap Australia.

2.2.4 Respon

Menurut Djalaludin Rakhmat (1991: 51), respon adalah suatu kegiatan (*activity*) dari organisme itu bukanlah semata-mata suatu gerakan yang positif, setiap jenis kegiatan (*activity*) yang ditimbulkan oleh suatu perangsang dapat juga disebut respon. Secara umum respon atau tanggapan dapat diartikan sebagai hasil atau kesan yang didapat (ditinggal) dari pengamatan tentang subjek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan-pesan.

Menurut Soenarjo (2005: 25), istilah respon dalam komunikasi adalah kegiatan komunikasi yang diharapkan memunyai hasil atau setelah komunikasi dinamakan efek. Suatu kegiatan komunikasi itu memberikan efek berupa respon dari komunikasi terhadap suatu pesan yang dilancarkan oleh komunikator. Ahmad Subandi (1982: 50), mengemukakan respon dengan istilah balik (*feedback*) yang memiliki peranan atau pengaruh yang besar dalam menentukan baik atau tidaknya suatu komunikasi.

Sedangkan menurut Poerdawarminta (1998: 20), respon diartikan sebagai tanggapan, reaksi dan jawaban. Tanggapan yang dilakukan seseorang dapat terjadi jika terpenuhi faktor penyebabnya. Hal ini perlu diketahui supaya individu yang bersangkutan dapat menanggapi dengan baik. Pada proses awalnya individu mengadakan tanggapan tidak hanya dari stimulus yang ditimbulkan oleh keadaan sekitar. Tidak semua stimulus yang ada persesuaian atau yang menarik darinya. Dengan demikian maka akan ditanggapi adalah individu tergantung pada stimulus juga bergantung pada keadaan individu itu sendiri

Adapun menurut Agus Sujanto (2004: 31), ada bermacam-macam tanggapan yaitu :

- 1) Tanggapan auditif, yakni tanggapan terhadap apa-apa yang telah didengarnya, baik berupa suara, kekuatan dan lain-lain.
- 2) Tanggapan visual, tanggapan terhadap sesuatu yang dilihat.
- 3) Tanggapan perasa, yakni tanggapan terhadap sesuatu yang dialaminya

2.2.5 Konsep *Rational Choice*

Konsep rational choice (pilihan rasional) merupakan salah satu konsep yang seringkali digunakan oleh para ilmuwan politik dan juga ilmuwan ekonomi. Konsep ini lahir karena adanya sifat alami manusia yang akan terus mempertimbangkan untung dan rugi dalam membuat suatu keputusan (Kavanagh, 1992: 146). Sehingga berdasarkan hal tersebut, esensi dari rational choice adalah ketika dihadapkan pada beberapa alur tindakan kebiasaan manusia yang kerap kali memilih alur yang mereka yakini akan mendatangkan manfaat paling besar bagi manusia tersebut. Dalam hal ini adapuN asumsi dasar dari rational choice dalam membuat sebuah pilihan atau keputusan yakni dipengaruhi oleh beberapa hal yang meliputi (Elster, 1989: 22):

1. Manusia memiliki seperangkat prefensi – prefensi yang bisa mereka pahami yang dimana akan ditata menurut skala prioritas dan akan dibandingkan antara yang satu dengan yang lainnya.
2. Tatanan prefensi ini bersifat transitif atau konsisten dalam logika.
3. Tatanan prefensi itu didasarkan pada prinsip “memaksimalkan manfaat” dan “meminimalisir resiko”.
4. Manusia pada dasarnya adalah mahluk egois.

Penjelasan di atas pun didukung oleh beberapa pendekatan seperti pendekatan pluralis yang berasumsi bahwa pada dasarnya manusia memiliki kepentingan berbeda – beda, maka secara sukarela mereka akan memilih kelompok yang kepentingannya sama ataupun yang mampu mengakomodasikan kepentingannya (Warg, 2002: 5). Sehingga pada akhirnya akan tercipta suatu interest group (kelompok kepentingan). Penjelasan lainnya pun didukung oleh

pendekatan korporatis yang menganggap bahwa rational choice selaras dengan pola perilaku pembuatan kebijakan negara – negara demokratis barat. Hal ini dikarenakan negara akan memilih untuk bekerjasama dengan negara lain yang akan memberikan keuntungan bagi negaranya guna meminimalisir dari berbagai resiko lainnya.

Dalam hal ini, konsep rational choice akan digunakan penulis dalam menganalisis terkait beberapa kebijakan yang dikeluarkan Australia dalam merespon peningkatan kapabilitas militer yang dilakukan Indonesia, sebagai wujud tindakan hasil dari rasionalitas Australia dalam memutuskan kebijakan yang akan menguntungkan bagi negara Australia dalam segi politik ataupun ekonomi.

2.3 Kerangka Pikir

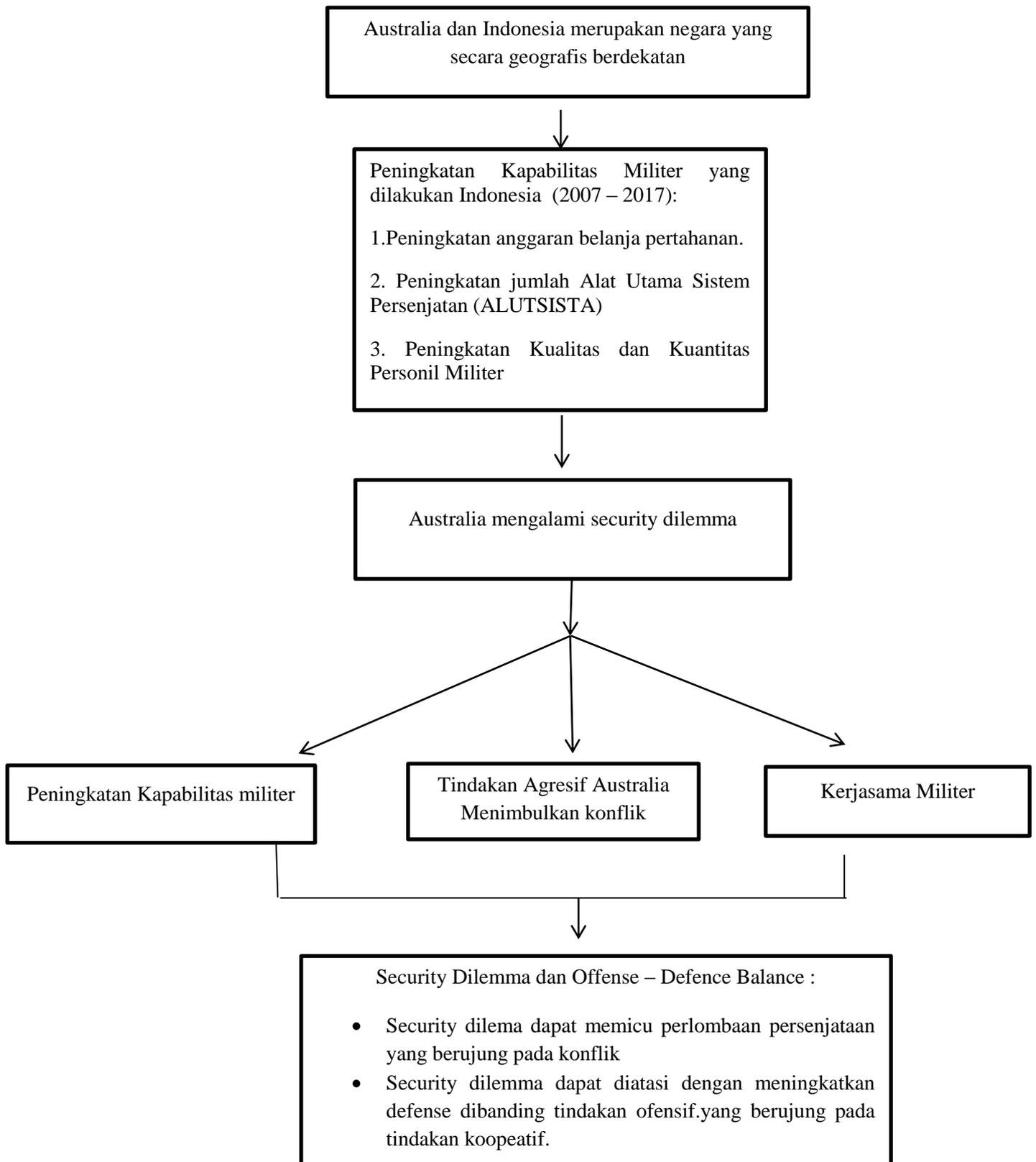
Dalam kerangka pikir, penulis akan menjelaskan mengenai bagaimana respon yang diberikan Australia terhadap adanya kondisi *security dilemma* yang dialami Australia akibat peningkatan kapabilitas militer yang terus dilakukan oleh Indonesia dari tahun 2007 – 2017.

Penjelasan ini digambarkan dengan bagaimana pada mulanya Australia mengalami *security dilemma* atas peningkatan kapabilitas militer yang dilakukan Indonesia, yang dimana walaupun berada di tengah ancaman akan setiap peningkatan kapabilitas militer yang dilakukan Indonesia mulai dari peningkatan anggaran belanja, peningkatan ALUTSISTA dan juga peningkatan kualitas personil militer Indonesia namun hal ini justru direspon Australia dengan berbagai bentuk tindakan yang defensif dan kooperatif.

Bentuk defensif dan kooperatif yang menjadi respon Australia ini terlihat dalam tiga hal yang meliputi:

- Peningkatan kapabilitas militer Australia yang meliputi peningkatan anggaran belanja militer Australia, peningkatan ALUTSISTA Australia dan juga peningkatan kualitas personil militer
- Tindakan agresif Australia yang dimana Australia melakukan berbagai insiden pelanggaran dan penyadapan secara serius.
- Kebijakan luar negeri Australia dalam melakukan kerjasama militer yang mulai dari latihan militer bersama serta berbagai perjanjian terkait keamanan yang dilakukan oleh Australia dan Indonesia.

Selanjutnya kerangka pikir penelitian ini apabila digambarkan dalam bentuk skema akan terlihat seperti berikut:



Gambar 1 : Kerangka pikir

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tipe deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif dapat didefinisikan sebagai teknik penelitian yang intuitif dan sistematis untuk membantu seorang peneliti menghasilkan pengetahuan dengan cara yang efisien dan koheren (King, 2015: 36). Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengembangkan konsep pada suatu masalah yang dihadapi serta menerangkan realitas yang berkaitan dengan konsep dan teori untuk meningkatkan pemahaman tentang fenomena, aktivitas-aktivitas, serta proses-proses sosial. Menurut Denzin K Norman (2011: 25), dijelaskan bahwa penelitian kualitatif lebih menekankan pada paradigma penafsiran, serta hubungan yang interaktif antara teori dan penelitian.

Menurut Susa E. Wyse (2011: 45), juga menjelaskan bahwa penelitian kualitatif disebut juga sebagai penelitian yang bersifat eksplorasi yang dimana penelitian kualitatif digunakan untuk mendapatkan pemahaman mengenai alasan, opini dan motivasi yang mendasari suatu perilaku. Metode penelitian kualitatif dalam hubungan internasional secara umum merujuk pada pengumpulan data dan strategi atau teknik analisis data, yang bergantung pada data non-numerik (Bakry, 2016 : 18). Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai pemahaman dunia di sekitar kita, dan karena itu

mengharuskan kita untuk fokus pada makna dan proses yang membentuk hubungan internasional. Penelitian kualitatif sering mengandalkan penalaran induktif, hal ini karena penelitian kualitatif pada umumnya menghasilkan proporsi teoritis baru dari pengamatan empiris yang telah dilakukan.

Berdasarkan berbagai definisi tersebut penulis akan melakukan pemahaman terkait respon Australia terhadap peningkatan kapabilitas militer yang dilakukan oleh Indonesia yang dimulai dari tahun 2007 – 2017 dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Metode ini dianggap relevan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, karena penalaran induktif akan diterapkan dalam penelitian ini. Peneliti akan melakukan pengumpulan data dan melakukan analisis data yang kemudian akan dilakukan penarikan kesimpulan untuk memunculkan fakta baru.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah pemusatan fokus kepada intisari penelitian yang akan dilakukan. Hal tersebut harus dilakukan dengan cara eksplisit agar kedepannya dapat meringankan peneliti sebelum turun atau melakukan observasi/pengamatan. Fokus penelitian merupakan garis terbesar dalam penelitian, sehingga observasi dan analisa hasil penelitian akan menjadi lebih terarah. Merujuk pada hal tersebut, maka peneliti memfokuskan penelitian ini pada respon pemerintah Australia terhadap peningkatan kapabilitas militer Indonesia yang dilihat dari :

1. Peningkatan Kapabilitas Militer Australia
2. Tindakan Agresif Australia terhadap Indonesia
3. Kerjasama Militer Australia – Indonesia

3.3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder yang dimana penulis memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian melalui berbagai sumber meliputi: jurnal – jurnal ilmiah, buku, laporan tertulis dan dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian.

Sumber data berasal dari dokumen-dokumen resmi mengenai kebijakan yang dikeluarkan oleh Australia seperti melalui *defense white paper Australia* dan *defensedepartmentofAustralia.com*. Selain itu penulis juga memperoleh data dari portal berita internasional seperti *cnn.com*, *bbc.com*, *reuter*. Portal situs lembaga negara/perserikatan/organisasi internasional seperti *militarybalance.com*, *stockholminternationalpeaceresearchinstitute.com* dan *globalfirepower.com*

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan data melalui informasi yang tertera atau terdapat pada data-data sekunder. Data sekunder tersebut kemudian didapat dari :

1. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui buku, koleksi perpustakaan, jurnal, situs resmi, berita, majalah yang berkaitan dengan tema penelitian. Dalam hal ini penulis menggunakan buku yang terdapat di perpustakaan Universitas Lampung dan *e-book* dari situs resmi.

2. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan menelaah sejumlah dokumen-dokumen resmi. Sumber data berasal dari dokumen-dokumen resmi mengenai kebijakan yang dikeluarkan oleh Australia dan Indonesia yang diperoleh melalui situs resmi pemerintah Australia seperti *defensedepartmentofAustralia.com*, *www.kemlu.go.id* dan portal situs lembaga negara/perserikatan/organisasi internasional resmi seperti *militarybalance.com*.

3.5 Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, teknik penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan teknik analisis *secondary analysis*. Analisis data sekunder digunakan untuk menggambarkan berbagai praktik analisis dengan menggunakan data yang sudah ada, baik data yang dikumpulkan oleh peneliti lain maupun yang dikumpulkan oleh instansi-instansi pemerintah, baik untuk meneliti pertanyaan penelitian baru maupun meneliti pertanyaan peneliti utama (yang asli) untuk keperluan pembuktian (Heaton, 2014:1). Menurut Vogel Hinds, tujuan analisis data sekunder adalah untuk menerapkan titik ulasan alternatif (*alternative point of review*) atau perspektif baru atas data yang telah terkumpul. Selain itu, teknik analisis data ini juga baik digunakan oleh peneliti untuk menggunakan ulang data yang telah dikumpulkan oleh peneliti.

Analisis sekunder melibatkan lebih dari sekedar kegiatan mengutip penelitian yang sudah ada, tetapi juga menyiratkan analisis ulang terhadap data tersebut. Dalam menganalisis ulang data yang sudah ada, ada beberapa hal yang

harus diperhitungkan. *Pertama*, kita tidak memiliki tingkat pengendalian yang sama atas data yang ada, berbeda dengan saat menghasilkan data kita sendiri. Sebab itu, sangat penting untuk benar-benar mengetahui dengan jelas tentang lingkungan di mana data dihasilkan dan sejauh mana relevansinya dengan pertanyaan penelitian penulis. *Kedua*, kita bisa mengajukan pertanyaan yang berbeda tergantung pada apakah data dalam format mentah atau agregat (Hinds, 1997:408-424).

Proses analisis data dalam penelitian ini merujuk pada teknik analisis data menurut Miles dan Huberman. Miles dan Huberman membagi tahapan analisis pada analisis data sekunder, ketiga tahapan itu diantaranya (Huberman, 1994 : 10)

1. Reduksi data

Proses reduksi data merupakan proses menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, mengkategorikan, serta membuang data yang tidak perlu.

2. Penyajian data (*display*)

Setelah melakukan proses reduksi, maka tahap selanjutnya adalah penyajian data. Dalam tahap ini data ditampilkan dalam bentuk catatan lapangan, tabel dan grafik.

3. Penarikan kesimpulan/verifikasi

Dalam tahap terakhir ini penulis memaparkan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada, serta deskripsi atau gambaran objek yang sebelumnya masih bias.

BAB IV. GAMBARAN UMUM

Bab ini akan memaparkan kondisi umum negara-negara yang terlibat di dalam penelitian ini, yaitu Australia dan Indonesia. Paparan dibagi menjadi tiga bagian. Setelah menjelaskan kondisi umum Australia dan Indonesia pada bagian pertama, bagian kedua akan menguraikan dinamika hubungan yang terjadi antara Indonesia dan Australia dari tahun 2007 – 2017 dan pada bagian ke tiga akan menguraikan terkait peningkatan kapabilitas militer yang dilakukan Indonesia dari tahun 2007 – 2017.

4.1 Kondisi Umum Australia

Australia merupakan negara yang memiliki letak geografis berdekatan dengan negara-negara di Pasifik Selatan dan Asia Tenggara, sehingga letak geografis Australia berada di lingkungan negara-negara yang berbeda secara sosial, kultural, ras, etnis dan adat kebudayaan dengan Australia. Faktor tersebut merupakan alasan bagi Australia disebut sebagai *misplaced continent* atau *frightened country*. Latar belakang Australia sebagai *misplaced continent* terlihat dari pelaksanaan sistem pemerintahan Australia yang mengarah ke Eropa. Namun secara geografis letak Australia berada pada lingkaran masyarakat yang berbeda, seperti Pasifik Selatan (Darmawan, 2012: 93). Dalam kenyataan seperti ini, posisi politik Australia berada di antara akar budaya Inggris dan hubungannya dengan negara- negara Asia Pasifik karena kedekatan geografis.

Perubahan wajah politik dunia setelah berakhirnya Perang Dunia II sangat berpengaruh terhadap politik luar negeri Australia. Penyerbuan Jepang ke Pasifik yang diikuti dengan pendudukan wilayah Darwin (Bereson & Rosenblat, 1979: 35), dan pada saat Australia mempertanyakan sumbangsih Inggris untuk membantu Australia tetapi tidak memperoleh bantuan sebagaimana yang diinginkan, menyebabkan Australia mulai dekat dengan Amerika Serikat memberikan ilustrasi bahwa semakin besar pengaruh dan kekuatan Amerika Serikat di Pasifik, menyebabkan Australia menyandarkan diri pada kekuatan Amerika Serikat untuk keamanannya (Siboro, 1989 : 180).

Australia, New Zealand, United States Security Treaty atau *ANZUS treaty* merupakan pakta pertahanan bersama Australia, New Zealand, dan Amerika Serikat yang mengikat para anggotanya untuk menyadari bahwa serangan bersenjata di wilayah Pasifik oleh salah satu dari mereka dapat membahayakan perdamaian dan keselamatan yang lain. Australia memandang bahwa keamanan Australia bergantung pada hubungan yang kuat dengan Amerika Serikat dan ANZUS memiliki dukungan kedua negara yang luas. Sehingga, kemampuan Australia untuk membentuk lingkungan keamanan tergantung pada hubungan keamanan dengan Amerika Serikat yang memfasilitasi pengembangan kemampuan dan profesionalisme pasukan pertahanan Australia (Aussiebuddy, 2008).

Kedekatan Australia dengan Amerika Serikat utamanya adalah dalam mengantisi-pasi masalah pertahanan, yang dapat diterjemahkan sebagai kepentingan pertahanan militer Australia bergantung pada Amerika Serikat. Akan tetapi, langkah Australia tidak hanya berhenti sampai di sana, sebab masalah

pertahanan tidak dapat diselesaikan hanya dengan mengandalkan mesin pertempuran yang canggih. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, bahwa kesalahletakan Australia mengharuskan negara tersebut menyadari lingkungan sekitarnya yang berbeda baik secara fisik maupun budaya.

Australia harus menata kehidupan politik luar negerinya dengan mempertimbangkan *good neighbourhood* dengan negara-negara di sekitarnya. Sebagai contoh, untuk membendung penyebaran komunis di Asia Tenggara, setelah mundurnya Perancis dari Vietnam, maka pada tahun 1954 dibentuk SEATO (*Southeast Asia Treaty Organization*) yang anggotanya adalah Australia, New Zealand, Perancis, Inggris, Pakistan, Filipina, Thailand, dan Amerika Serikat. Meskipun organisasi pertahanan bersama ini tidak berumur panjang karena tahun 1977 dibubarkan sejalan dengan mundurnya Amerika Serikat dari Vietnam tetapi terlihat adanya niat baik Australia untuk beradaptasi dengan negara-negara di sekitarnya (Bhakti, 2008: 44).

Selain itu, munculnya *Asean Regional Forum* (ARF) yang dibentuk tahun 1994 juga merupakan jawaban terhadap kepentingan Australia menata kehidupan politik yang mengarah kepada bertetangga baik tersebut. Asean Regional Forum memiliki 25 negara anggota yang menaruh perhatian bagi keamanan Asia Pasifik. Dari 25 anggota ARF, terdapat 10 anggota ASEAN (Brunei, Myanmar, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam); 10 negara mitra Negara ASEAN (Australia, Kanada, Cina, Uni Eropa, India, Jepang, Selandia Baru, Korea Selatan, Rusia, dan Amerika Serikat), dan 5 negara pengamat ASEAN (Papua Nugini, Korea Utara, Mongolia, Pakistan dan Timor Leste). ARF menjadi suatu wadah tempat negara anggota dapat berdiskusi

mengenai isu keamanan regional yang terjadi dan mengembangkan aturan kerjasama untuk meningkatkan perdamaian dan keamanan di kawasan tersebut (Aussiebuddy, 2008).

Berbagai bentuk kerjasama yang dilakukan Australia dengan negara – negara yang terletak diwilayah kawasan Asia Pasifik tentu saja memuat kepentingan nasional Australia didalamnya yang dimana bertujuan untuk menciptakan pertahanan keamanan bagi negara Australia. Dalam melihat kepentingan nasional Australia, terdapat empat prioritas pokok yakni (Bhakti, 1996: 23-25) :

1. Memelihara keamanan yang positif dan lingkungan strategis dalam kawasannya. Berarti Australia memiliki kepentingan langsung dalam menjamin situasi yang aman dan damai di Negara-negara sekitarnya agar tetap terpelihara dengan stabil.
2. Terciptanya keamanan global.
3. Kerjasama ekonomi, investasi dan perdagangan. Australia ingin memobilisasi pengaruh politik internasional untuk mendukung tujuan ekonomi internasional dengan cara membuka pasar barang ekspor, memperluas kesempatan-kesempatan ekonomi bagi sektor industri Australia dan terus menciptakan persepsi bahwa Australia merupakan tempat yang menarik untuk melakukan penanaman modal asing serta menempatkan pemerintah Australia sebagai mitra yang ideal untuk kerjasama.
4. Berperan aktif untuk menyebarkan konstruksi positif terhadap berbagai aneka ragam isu yang sekarang menjadi subyek diplomasi multilateral,

seperti penanganan masalah pengungsi, terorisme, perdagangan obat-obatan terlarang dan masalah kesehatan dunia.

Berdasarkan tujuan dan kepentingan nasional Australia yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Australia, Perdana Menteri Howard pada masa pemerintahannya menetapkan kebijakan politik luar negerinya sebagai berikut (Bhakti, 1996: 25-26) :

1. Melindungi teritorial Australia dari serangan fisik dan memelihara kapasitas Australia dalam membuat kebijakan independen.
2. Membangun dan melanjutkan kapasitas kompetensi perdagangan dan investasi pada skala internasional, tapi dengan penekanan pada pasar Asia-Pasifik.
3. Menghapuskan senjata pemusnah massal dan untuk menahan konflik regional (di dalam dan di luar Asia), peningkatan keamanan dalam menghadapi terorisme internasional, melalui migrasi tidak sah, tentang penyakit, arus pengungsi, penurunan kualitas lingkungan, narkoba dan kejahatan transnational, sehingga dapat meminimalisasikan risiko konflik global.
4. Memelihara dan mempromosikan Australia sebagai negara yang memiliki nilai demokrasi liberal yang direfleksikan dari intelektual Eropa dan peninggalan budaya, untuk menarik minat negaranegara Asia Pasifik yang memiliki sejarah dan budaya yang berbeda (The National Interest, 1997:16).

Menyimak kebijakan politik luar negeri Australia tersebut, maka dapat dianalisis bahwa melindungi teritorial Australia dari serangan fisik berarti arah

pengembangan militer Australia yang mandiri. Di lihat dari segi geografis, Australia sangat mudah diserang dari arah utara. Dengan demikian militer Australia harus selalu siap dalam menyelenggarakan pertahanan di belahan utara negaranya. Mengingat penduduk Australia sangat kecil (hanya berjumlah lebih kurang 20 juta jiwa yang mengisi satu benua), maka dasar pertahanannya bertumpu pada teknologi tinggi (Darmawan, 2006:110).

Pengembangan militer yang mengarah ke utara juga memiliki makna lain yang dimana perlindungan teritorial lebih difokuskan pada penahanan serangan dari utara. Artinya, tetangga Australia yang paling dekat di utara adalah Indonesia. Bagaimana Australia menata hubungannya dengan Indonesia, mengingat pertahanan yang dibangun oleh Australia mengarah di utara, yang dapat ditanggapi oleh pemerintah Indonesia sebagai membangun pertahanan terhadap ekspansi Indonesia.

Hal ini terlihat dari perjalanan sejarah yang terlihat bahwa seringkali terjadi ketidakharmonisan hubungan antara Australia dengan Indonesia. Dapat dilihat bagaimana keterlibatan Australia yang berkonspirasi dengan Belanda pada peristiwa Irian Barat (Batara Hutagalung, 2008), Keterlibatan Australia dalam Pemberontakan PRRI/Permesta (Indra Piliang, 2002) yang memperlihatkan politik Australia terhadap pemberontakan dalam negeri Indonesia antara ucapan dan tindakan sangat berbeda (Indra Piliang, 2002), berdasarkan resensinya terhadap buku Hadi Subadio Keterlibatan Australia dalam pemberontakan PRRI/Permesta, hal. 228-229).

Masalah Timor Timur juga memperlihatkan kepentingan Australia dalam menyangga keamanannya dari serangan di utara. Kepentingan utama Australia

terhadap Timor Timur adalah menghindari tidak melebarnya konflik di Timtim masa 1970an yang dapat menjadi ancaman bagi Australia. Politik luar negeri Paul Keating ini membuat hubungan antara Australia dengan Indonesia kooperatif dan bersahabat tetapi setelah naiknya Howard yang mengubah politik luar negerinya dengan pengakuan kemerdekaan Timor Leste, maka hubungan tersebut menjadi tegang. Dua periode tersebutlah yang seolah memperlihatkan bagaimana hubungan antara Australia dengan Indonesia (Asep Setiawan, 2006).

4.2 Kondisi Umum Indonesia

Letak geografis Indonesia berada dalam kedudukan yang penting yaitu berada diperempatan jalan dunia antara Samudera Indonesia dan samudera Pasifik antara Benua Asia dan Benua Australia dengan politik luar negerinya yang bebas aktif (Bramatidjaja,1990: 25). Berdasarkan politik luar negeri bebas aktif inilah maka negara Indonesia berhak menentukan arah, sikap, dan keinginannya sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Dengan demikian, negara Indonesia tidak dapat dipengaruhi kebijakan politik luar negeri negara lain.

Negara Indonesia secara geografis terletak diperempatan jalan yang disebut *life line*. Disamping letak kedudukan itu wilayahnya juga termasuk dalam daerah regional Asia Tenggara. Dalam regional Asia Tenggara termasuk negara seperti Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Laos, Cambodia, Brunei Darussalam. Negara-negara tersebut merupakan negara-negara tetangga Indonesia yang terdekat disebelah utara. Sebelah selatan Indonesia terdapat dua negara yakni Australia dan Selandia Baru (Darmawan,2006 : 118).

Kedua negara ini terletak dalam benua yang terpisah satu dengan lainnya. Dengan negara-negara tetangga, Indonesia menjalankan politik tetangga yang baik

atau “*good neighbourhood policy*”. *Good neighbourhood policy* yang dilakukan oleh Indonesia ini harus mempunyai makna yang aktif sesuai dengan pengertian dari *subject policy*, dalam hal ini pada sengketa Laut Cina Selatan yang melibatkan sebagian besar negara-negara yang ada di regional ASEAN. Indonesia tidak sekedar untuk menjadi tetangga yang baik bagi negara-negara sekitar Indonesia saja. Tetapi juga harus aktif menyelenggarakan segala sesuatu, supaya negara-negara tetangga Indonesia bersikap baik terhadap Indonesia (Darwaman, 2006:123).

Politik luar negeri bebas aktif inilah yang pada akhirnya membuat Indonesia bebas untuk memilih kerjasama diberbagai bidang seperti ekonomi ataupun kerjasama militer tanpa adanya ikatan yang formal dengan negara – negara lainnya. Hal ini dapat terlihat dengan banyaknya organisasi internasional ataupun kerjasama bilateral maupun multilateral yang diikuti Indonesia seperti ASEAN, FEALAC, PBB, APEC, OKI, G20 dan berbagai perjanjian internasional lainnya (BBC Indonesia, 18 Januari 2015).

Sehingga, hal inilah yang memberikan kedudukan Internasional yang penting, sulit diabaikan dan diperhitungkan oleh negara-negara lain di dunia ini untuk diperhitungkan. Keadaan demikian ini merupakan potensi dan kekuatan national yang harus dimanfaatkan. Indonesia dianggap memiliki posisi *life line* sehingga memiliki pengaruh dalam menjalin hubungan antara negara-negara lain dengan Indonesia. Menyadari kondisi demikian, Indonesia mulai membangun kekuatannya di mata Internasional seperti dengan banyaknya pembangunan ekonomi dan juga peningkatan kekuatan militer seperti peningkatan anggaran biaya pertahanannya, jumlah alat utama sistem persenjataan (ALUTSISTA) dan

juga kualitas dan kuantitas personil militer demi terciptanya suatu wilayah yang aman dan terhindar dari berbagai ancaman yang datang dari luar.

4.3 Dinamika Hubungan Indonesia – Australia

Indonesia dan Australia merupakan dua negara yang dilihat secara letak geografis sangatlah berdekatan dan membuat kedua hubungan negara tersebut menjadi istimewa. Bail Desmond menjelaskan bahwa dua negara tetangga biasanya memiliki kesamaan, paling tidak dalam hal etnis, budaya dan agama yang kemudian berdampak kepada kesamaan berbagai hal lainnya seperti kesamaan dalam hal kepentingan nasional, politik luar negeri dan masalah keamanan (Desmond, 2007 : 10). Hal tersebutlah yang menjadi faktor integrasi dua negara ataupun integrasi kawasan, karena semakin banyak persamaan maka semakin mudah negara – negara untuk bersatu.

Namun, tampaknya hal ini tidak berlaku bagi hubungan antara Australia dan Indonesia dan membuat hubungan antara kedua negara tersebut menjadi istimewa karena Indonesia dan Australia memiliki berbagai perbedaan yang sangat signifikan baik dalam hal etnis, ras, budaya dan agama. Mayoritas penduduk asli Australia adalah ras kaukasia yang berasal dari Eropa khususnya Belanda dan juga berwarna kulit putih. Hal ini tentu saja berbeda dengan kondisi penduduk asli Indonesia yang termasuk kedalam ras mongoloid (Desmond, 2007:15). Seperti yang dijelaskan oleh Paul Keating :

“No two neighbours anywhere in the world are as comprehensively unlike as Australia and Indonesia. We different in language, culture, religion, history, ethnicity, population size and in political, legal, and social systems. Usually neighbours share at least some characteristics brought about by proximity over time, but the Indonesian archipelago and the continental

land mass of Australia might well have been half a world apart”.
(Evan dan Grant, 1993: 184)

Kemudian, jika dilihat dari segi politik luar negeri dua negara tersebutpun sangatlah berbeda yang dimana kebijakan luar negeri Australia sejak awal pada dasarnya cenderung berporos ke barat yaitu kepada Inggris dan Amerika Serikat dalam mengikuti setiap ikatan moral dan tradisi nasionalnya dalam menjalankan politik luar negerinya, terlebih kepada Amerika Serikat yang dimana Australia terlihat sangat ketergantungan terhadap Amerika Serikat.

Hal ini tentulah berbeda dengan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Bebas berarti bahwa bangsa Indonesia berhak menentukan sikap menghadapi masalah-masalah yang ada tanpa berpihak pada blok-blok kekuatan atau persekutuan militer yang ada di dunia. Aktif berarti bahwa Indonesia selalu memperjuangkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial di dunia. Sehingga berdasarkan politik luar negeri yang bebas aktif inilah yang menghalangi Indonesia membangun aliansi militer secara formal dan membuat Australia menganggap bahwa Indonesia tidak mungkin diharapkan bisa membangun aliansi militer yang formal dan tetap dengan Australia (Setyawati dan Agussalim, 2015 : 5).

Oleh karena itu, hubungan Australia dan Indonesia kerap kali mengalami perubahan secara dinamis dari waktu ke waktu. Pada suatu waktu hubungan Indonesia dan Australia terlihat sangat bersahabat, kooperatif dan saling mendukung. Namun pada periode lainnya, hubungan kedua negara tersebut dipenuhi dengan saling curiga dan kurang bersahabat. Dalam ilmu keamanan internasional, hubungan kedua negara yang cenderung berkooperatif dan bekerja sama disebut sebagai *the pattern of amity* sedangkan hubungan kedua negara yang

cenderung dipenuhi dengan permusuhan dan konflikual disebut sebagai *the pattern of emity* (Arthanthy,2006: 12).

Perbenturan aspek *amity* dan *enmity* inilah yang menjadi faktor penting yang berpengaruh terhadap perbedaan sikap dan perilaku kebijakan luar negeri suatu negara dalam merespon setiap tindakan yang dilakukan oleh negara lainnya yang pada akhirnya memengaruhi dinamika hubungan kedua negara tersebut dari waktu ke waktu (Buzan, 1991:8).

Berdasarkan penjelasan di atas dan jika dianalisis dari sejarahnya, maka perkembangan hubungan antara Australia dan Indonesia jauh didominasi oleh sisi *enmity* (konflikual) dibandingkan sisi *amity* (kerjasama). Pada sisi Indonesia, aspek *amity* terhadap Australia mulai tumbuh dan berkembang sejak Indonesia masih berjuang untuk kemerdekaan yang dimana hubungan yang sangat akrab ditunjukkan oleh dukungan Australia kepada Indonesia dalam menghadapi Belanda. Hubungan yang sangat akrab ditunjukkan oleh dukungan Australia kepada Indonesia dalam menghadapi Belanda. Bentuk keharmonisan antar hubungan Indonesia dan Australia inipun semakin terlihat melalui :

a. Hubungan Politik

Hubungan politik antara Indonesia dan Australia jika dilihat dalam beberapa periode cenderung kooperati dan kokoh. Hal ini dapat terjadi karena tingginya komitmen yang dibandung antara dua pemimpin negara tersebut dalam mengembangkan *good neighborliness* serta peluang kerjasama yang saling menguntungkan seperti adanya instrumen legal/normatif yang terlihat melalui *Joint Declaration on Comprehensive*

Partnership yang diadakan pada tahun 2005 dan *Lombok Treaty* yang diadakan pada tahun 2006 (Darmawan, 2006: 121).

Dalam hal ini *Declaration on Comprehensive Partnership* memuat *road map* bagi pengembangan hubungan depan (*expand and deepen*) antara Indonesia dan Australia melalui forum-forum konkrit seperti IAMF (*Indonesia-Australia Ministerial Forum*). Sementara itu, *Lombok Treaty* memuat prinsip-prinsip penting, seperti penghormatan terhadap kedaulatan nasional, integritas wilayah serta komitmen kedua negara untuk tidak membiarkan wilayah masing-masing dijadikan sebagai *staging point* untuk mengusung tujuan separatisme.

b. Hubungan Ekonomi

Indonesia merupakan negara penerima *Official Development Assistance* (ODA) terbesar dari Australia. Dari total ODA Australia sebesar A\$ 3,7 milyar pada 2008-2009, Indonesia mendapat A\$ 462 juta atau naik A\$ 3,2 juta dari periode sebelumnya (A\$ 458,8 juta), terdiri dari Country Program (A\$ 182,7 juta) dan *Australia – Indonesia Partnership for Reconstruction and Development* atau AIPRD (A\$ 230,9 juta). Bantuan pembangunan ini *human security and stability; infrastructure and regional development; Aceh rehabilitation and health* (Kementerian Keuangan, 2018).

Kerangka AIPRD sampai pada tahun 2009 menjelaskan bahwa, Australia akan membangun 2000 gedung SMP di berbagai wilayah di Indonesia dan saat ini telah dibangun lebih dari 1.000 gedung SMP. Dalam kesempatan kunjungan ke Indonesia tanggal 11-12 Agustus 2008, Menteri

Luar Negeri Stephen Smith bersama Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda meresmikan gedung sekolah SMPN 4 Pallangga, Gowa yang merupakan sekolah ke-1000 dari rencana 2000 sekolah (BBC Indonesia, 16 Februari 2008).

Kerjasama pembangunan Indonesia-Australia ke depan telah tertuang pada *Country Strategy Framework (CSF) 2008–2013* yang berjumlah A\$ 2,5 milyar yang berlandaskan *joint ownership, joint management* dan fokus prioritas sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Indonesia (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2013). CSF merupakan dasar pelaksanaan kerjasama pembangunan Pemerintah Australia kepada Indonesia. Dalam tiga tahun terakhir, Pemerintah Indonesia menerima kontribusi yang cukup signifikan dari Pemerintah Australia dan diharapkan dapat terus meningkat. Selain itu, diharapkan komunikasi yang intensif antara kedua negara dapat terus ditingkatkan. CSF 2008-2013 akan menitikberatkan pada 4 (empat) pilar utama:

- (1) *Sustainable Growth and Economic Management;*
- (2) *Investing in People;*
- (3) *Democracy, Justice and Good Governance;*
- (4) *Safety and peace*

c. Hubungan Sosial dan Budaya

Dalam bidang sosial dan budaya, hubungan kedua negara ini terlihat sangat kooperatif. Hal ini dapat terlihat melalui data wisatawan Australia yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2007 – 2017, data wisatawan Australia ke Indonesia menunjukkan fluktuasi yang cukup baik yakni dari 391,862 pada tahun 2007 kemudian meningkat menjadi 314.432 pada tahun 2017 (Kementerian Pariwisata,2017).

Selain itu , hubungan sosial kedua negara ini juga terlihat melalui banyaknya perjanjian sosial terkait kerjasama dalam bidang pendidikan ataupun pertukaran budaya seperti program pertukaran pemimpin muslim muda dalam kebijakan Australia – Indonesia Institute , program *National Asian Language and Studies in Australian Schools Strategy* yang menjadi program peningkatan pertukaran antar warga dan institusi, khususnya di bidang media, pendidikan, kesenian, kesehatan dan pelatihan bahasa dan juga guna penguatan dan peningkatan pengajaran Bahasa Indonesia di Western Australia, Balai Bahasa Indonesia telah didirikan di Perth pada April 2008 untuk memberi pelayanan: (i) kursus bahasa Indonesia untuk umum; (ii) kelas-kelas bahasa dan budaya Indonesia; (iii) penyediaan tenaga pengajar bahasa Indonesia; dan (iv) terjemahan dokumen dan tenaga interpreter (Kementerian Pariwisata,2017).

Bukti lainnya yang menunjukkan bahwa hubungan Australia dan Indonesia sangat kooperatif adalah terlihat melalui Pemerintah Australia yang masih menerapkan kebijakan *travel advisory* untuk kunjungan warganya ke Indonesia. Walaupun Pemerintah Australia menyatakan

bahwa kebijakan ini tidak mempengaruhi jumlah kunjungan wisatawan Australia ke Indonesia, namun tetap berdampak pada kunjungan akademisi, siswa dalam kerangka *people-to-people contact* (Kementerian Luar Negeri Indonesia, 2017)

Namun, walaupun dengan adanya bentuk hubungan harmonis yang dialami Australia dan Indonesia, tetap saja hubungan kedua negara tersebut jauh didominasi oleh aspek *enmity* yang dimana hubungan antara Australia dan Indonesia dipenuhi dengan berbagai konflik, yang dimana dalam hal ini dapat terlihat dari perjalanan sejarah yang terlihat bahwa seringkali terjadi ketidakharmonisan hubungan antara Australia dengan Indonesia. Ketidakharmonisan hubungan dua negara tersebut terlihat dari bagaimana keterlibatan Australia yang berkonspirasi dengan Belanda pada peristiwa Irian Barat (Batara Hutagalung, 2008).

Kemudian, keterlibatan Australia dalam masalah Timor Timur juga memperlihatkan kepentingan Australia dalam menyangga keamanannya dari serangan di utara (Asep Setiawan, 2006). Kepentingan utama Australia terhadap Timor Timur adalah menghindari tidak melebarunya konflik di Timtim masa 1970an yang dapat menjadi ancaman bagi Australia (teori domino, ancaman komunis dari utara). Politik luar negeri yang dipimpin oleh Paul Keating memang membuat hubungan antara Australia dengan Indonesia mesra, tetapi setelah naiknya Howard yang mengubah politik luar negerinya dengan pengakuan kemerdekaan Timor Leste, maka hubungan tersebut menjadi tegang dan awal tahun 2007 menjadi tahun pertanda semakin kurang baiknya hubungan antara Indonesia dan Australia.

Berbagai konflik yang memicu renggangnya hubungan antara Australia dan Indonesia memuncak ketika pemerintah Australia diketahui melakukan penyadapan kepada pemerintah Indonesia pada tahun 2007 yang dibocorkan oleh Edward Snowden selaku Mantan Kontraktor NSA (*National Security Agency*) Amerika Serikat (BBC Indonesia, 18 Januari 2010).

Pemerintah Indonesiapun pada akhirnya mengeluarkan tiga respons. dalam mengatasi kasus tersebut yang meliputi : Pertama, melalui Kementerian Luar Negeri tertanggal 1 November 2013, Pemerintah Indonesia memanggil mantan duta besar Australia untuk Indonesia, Greg Moriarty, untuk dimintai klasifikasi 286 lebih lanjut tentang aktivitas spionase yang dilakukann di kantor kedutaan besar tersebut. Ke-dua, Pemerintah Indonesia memanggil pulang Duta Besar Indonesia untuk Australia, Nadjid Riphath, yang berada di Canberra, untuk melakukan konsultasi dengan Pemerintah Indonesia dan memberikan informasi mengenai kasus yang terjadi (bbc.com, 2013). Ketiga, ialah menghentikan secara sepihak dan mengkaji ulang kerja sama pertukaran informasi serta kerjasama militer (*Coordinated Military Operation*) yang dilakukan oleh Indonesia dengan Australia (kominfo.go.id, 2013).

Kemudian, insiden pelanggaran teritorial yang dilakukan kapal perang Australia yang masuk kedalam wilayah perairan indonesia tanpa izin pada tahun 2014 (Sydney Morning Herald, 18 Januari 2014). Hubungan antar kedua negara menjadi semakin ricuh pada bulan April 2015 ketika Presiden Indonesia Joko Widodo mengabaikan permintaan dari Australia untuk memberikan grasi kepada terdakwa pengedar narkoba Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, yang kemudian akhirnya dihukum mati. Hal tersebut membuat dunia Internasional

mengecam keras Indonesia karena hukuman mati tersebut. Terutama dari Australia sendiri yang sangat mengecam pelaksanaan hukuman mati tersebut yang membuat Australia menarik Duta Besarnya dari Indonesia pada tahun 2015, hal inipun semata – mata terjadinya karena Indonesia menunjukkan sisi tegasnya kepada Australia untuk mempertahankan kedaulatan dan kekuatan Indonesia dalam menghadapi suatu ancaman (BBC Indonesia, 16 April 2016).

Pengaturan kasus suaka atau pengungsi memang merupakan permasalahan yang kerap kali terjadi terjadi diantar Australia dan Indonesia yang dimana kedua negara tersebut merupakan kedua negara yang saling berdekatan dan menjadi rute perjalanan para suaka. Hal ini terlihat mulai dari tahun 2014 yang dimana Australia mendorong 26 imigran dari berbagai negara di Timur Tengah untuk mencari suaka di Indonesia yang dijelaskan oleh Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Indonesia yang menuding Australia telah melanggar hak asasi para pencari suaka dan melanggar Deklarasi Jakarta yang berisi bahwa penanganan imigran gelap haruslah melibatkan pemerintah negara asal, negara singgah dan negara tujuan (Tempo.co, 22 Oktober 2014).

Permasalah pencarian suaka lainnya terjadi juga pada bulan juni 2014 yang dimana berujung pada vonis bersalah kepada dua nelayan Indonesia yang mengendalikan kapal yakni Boy Djara dan Justhen yang divonis selama 6 dan 9 tahun akibat tenggelamnya kapal yang mengangkut 100 pencari suaka asal Afganistan dan Pakistan di 100 mil laut Pulau Christmas (Tempo.co, 22 Oktober 2014).

Ketegangan yang dialami antara Australia dan Indonesia terkait urusan pengungsipun semakin terlihat ketika beberapa media Australia pada juni 2015

menyebut sejumlah pejabat pemerintah Australia melakukan penyuaipan kepada sejumlah kapten dan kru kapal untuk membawa keluar 65 imigran gelap asal Bangladesh, Sri Lanka dan Myanmar dari Australia menuju Indonesia (Tempo.co, 22 Oktober 2014).

Pernyataan inipun pada akhirnya mendapat respon dari Menteri Luar Negeri Indonesia yang meminta klarifikasi akan hal tersebut karena Australia dianggap telah melanggar aturan konvensi pengungsi PBB tahun 1951 yang telah diratifikasi, namun respon yang diberikan oleh Perdana Menteri Tony Abbot menyatakan bahwa hal tersebut merupakan suatu kelalaian dan kesalahan dari Indonesia yang tidak menjaga ketat wilayah perbatasannya dan Australia menganggap bahwa tindakan tersebut merupakan suatu strategi kreatif untuk menghentikan para imigran yang dilakukan oleh departemen imigrasi Australia (Tirto.id, 10 Oktober 2016).

Kondisi konflikual antara Australia dan Indonesiapun semakin terlihat dengan terjadinya fenomena kekalahan Australia dalam perlombaan *Australian Army Skill at Arms Meeting (AASAM)* yang digelar di Victoria pada tahun 2015 yang dimenangkan oleh Indonesia selama 8 tahun berturut-turut sehingga membuat Australia ingin sekali mengetahui senjata senapan yang digunakan Indonesia serta ketika Indonesia membeli 10 pesawat jet tempur Su-35 Rusia dan 3 kapal selam dari Korea Selatan yang direson Australia dengan pembelian kapal selam melalui program *Military off the Shelf (MOTS)* yang dinamai *SEA 1000 Project* pada tahun 2016 (Australian Government Department of Defense, 2017).

Australia-Indonesia memang sudah ditakdirkan untuk menjadi dua negara yang bertetangga. Secara geografis kedua negara berdekatan, tetapi secara kultural

kedua bangsa ini sangat berbeda. Dari aspek kepentingan nasional, Australia akan tetap mempertimbangkan beberapa hal penting. Indonesia dianggap sebagai negara tetangga yang secara geografis sangat strategis bagi kepentingan Australia.

Indonesia yang telah memasuki tahapan demokrasi yang cukup matang adalah modal utama bagi Australia untuk mengadakan kontak kelembagaan yang dapat menyebabkan meluasnya pengaruh Australia di Indonesia, khususnya di tataran elit kekuasaan. Sebagai negara mayoritas Muslim terbesar, Indonesia adalah mitra yang tidak mungkin dikesampingkan terutama apabila kelembagaan militer Indonesia lebih dapat diandalkan dalam perjuangan Australia melawan terorisme internasional.

Australia memandang ekonomi yang stabil dan kokoh akan menjadi jalan bagi terus berlangsungnya hubungan transaksi perdagangan internasional, walaupun belum sepenuhnya pulih. Terbukanya pasar Indonesia bagi ekspor barang-barang dengan teknologi tinggi Australia di era kawasan perdagangan bebas. Australia memiliki potensi di berbagai bidang seperti ekonomi, pendidikan, perdagangan, politik, pertahanan, ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat digali oleh pihak Indonesia.

Kekhawatiran terhadap makin berkurangnya simpati negara-negara Dunia Ketiga terhadap Amerika Serikat membuat Amerika Serikat dalam perang global melawan terorisme telah semakin mendesak Australia untuk bekerjasama dengan Negara-negara ASEAN. Secara geografis, ASEAN, termasuk di dalamnya Indonesia, merupakan wilayah yang memiliki hubungan dengan Australia sehingga kerjasama positif dengan Australia amat membantu penyelesaian masalah bersama.

Namun dengan adanya berbagai bukti mengenai permasalahan pengungsi atau pelanggaran lainnya yang dilakukan Antara Australia dan Indonesiapun pada akhirnya membuat Indonesia menyadari bahwa terdapat berbagai kepentingan yang dibawa oleh Australia selama menjalin berbagai kerjasama antara Australia dan Indonesia yang terlihat sebagai bentuk pertahanannya terhadap ekspansi Indonesia dan ancaman dari luar. Hal inilah yang sedang terjadi terkait hubungan Indonesia yang dijadikan sebagai negara transit atau negara atau zona penyangga Australia dari berbagai ancaman utara yang ingin masuk ke Australia sehingga berbagai peristiwa tersebutlah yang berujung kepada tingginya kewaspadaan Indonesia terhadap Australia dan menjadi dinamika hubungan antara Australia dan Indonesia.

4.4 Peningkatan Kapabilitas Militer Indonesia

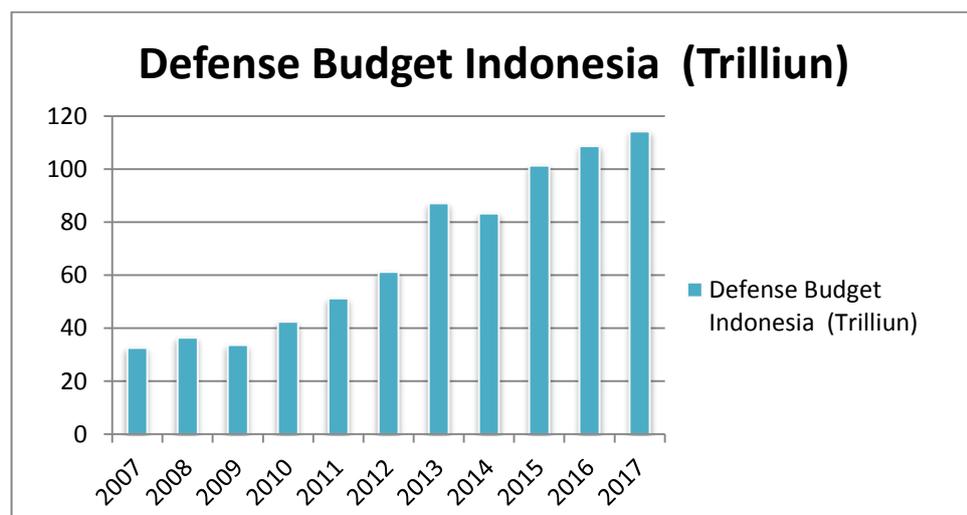
Peningkatan kapabilitas militer merupakan suatu hal yang sangat penting bagi suatu negara. Hal ini dikarenakan kapabilitas militer suatu negara memiliki korelasi dalam terciptanya keamanan di suatu negara. Kondisi inilah yang terjadi kepada Indonesia, peningkatan kapabilitas militer yang dilakukan Indonesia melalui peningkatan *defense budget*, kualitas dan kuantitas personil militer juga ALUTSISTA terjadi karena adanya kekhawatiran Indonesia terhadap datangnya berbagai ancaman yang ada baik dalam domestik ataupun dari luar. Sehingga, hal inilah yang pada akhirnya memicu Indonesia untuk terus meningkatkan kapabilitas militernya dalam menciptakan keamanan negaranya dari berbagai ancaman yang ada seperti terorisme, pengungsi ilegal, ataupun ancaman dari negara lainnya. Selain itu, peningkatan kapabilitas militer yang dilakukan Indonesia juga

bertujuan untuk menunjukkan kepada dunia internasional terkait *power* yang dimiliki oleh Indonesia.

4.4.1 Peningkatan *Defense Budget* Indonesia (2007 – 2017)

Peningkatan kapabilitas militer yang pertama kali dilakukan oleh Indonesia terlihat melalui peningkatan anggaran belanja pertahannya. Hal ini tentu saja terjadi karena *defense budget* Indonesia yang nantinya akan memfasilitasi segala kebutuhan peningkatan kekuatan militer yang dilakukan oleh Indonesia. Sehingga peningkatan tersebut terlihat melalui diagram di bawah ini :

Diagram 2. Jumlah Peningkatan Anggaran Belanja Militer Indonesia 2007 - 2017



Sumber : Diolah dari lampiran anggaran biaya pertahanan Kemenkeu 2017

Berdasarkan diagram di atas terlihat bahwa Indonesia sangat memperhatikan dan mengedepankan terkait keamanan nasionalnya yang dialokasikan melalui setiap kebijakan pemerintah Indonesia melalui setiap anggaran biaya pertahanan negara Indonesia yang terus meningkat.

Hal ini terlihat mulai dari tahun 2007 yang dimana pemerintah Indonesia mulai meningkatkan *defense budgetnya* menjadi 32,6 triliun. Hal ini dapat terjadi

mengingat kondisi alutsista TNI yang saat ini rata-rata usia pakainya sudah tua (25 sampai dengan 40 tahun) berpengaruh pada tingkat kesiapan operasional dan membutuhkan biaya operasional dan pemeliharaan yang tinggi. Kondisi TNI baik dari segi SDM maupun sarana dan prasarana termasuk ALUTSISTA masih jauh untuk menjadi postur pertahanan negara dalam kebutuhan *minimum essential force* (MEF) dengan luas wilayah dan besarnya jumlah penduduk (Defense White Paper Indonesia, 2017).

Peningkatan anggaran belanja pertahanan Indonesiapun semakin meningkat pada tahun 2008 menjadi 36,39 triliun, walaupun pada tahun 2009, biaya anggaran belanja pertahanan Indonesia menurun menjadi 33,6 triliun yang diikuti dengan penurunan GDP Indonesia pada tahun tersebut.

Pemerintah Indonesiapun semakin meningkatkan anggaran biaya pertahanannya tahun 2010 menjadi 42,4 triliun dan semakin meningkat pada tahun 2011 menjadi 51,2 triliun. Angka *defense budget* Indonesiapun semakin tinggi, diawali dari tahun 2012 sebesar 61,3 triliun dan meningkat cukup signifikan pada tahun 2013 sebesar 87,7 triliun. Peningkatan anggaran biaya pertahanan Indonesiapun semakin meningkat dikarenakan tingginya pengeluaran negara dalam meningkatkan pembiayaan personil militer Indonesia dalam menunjang kegiatan – kegiatan yang akan berguna dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas personil militer serta pengeluaran yang digunakan dalam pembelian ALUTSISTA negara dalam menghadapi berbagai ancaman yang ada.

Menjelang tahun 2014, biaya anggaran pertahanan Indonesia pun mengalami penurunan sebesar 83,3 Triliun yang menyebabkan pemerintah Indonesia meningkatkan *defense budget* untuk pertahanan dan keamanan negara

yang pada tahun 2015 kembali meningkat menjadi 101,4 Triliun dan semakin meningkat pada tahun 2016 sebesar 108,7 Triliun hingga pada tahun 2017 sebesar 114,2 Triliun yang dimana membuat *defense budget* Indonesia semakin tinggi dan menjadi urutan ke 19 didunia. Peningkatan inipun diikuti dengan banyaknya bentuk kerjasama pertahanan dan militer dengan negara lain serta peningkatan bentuk kapabilitas militer lainnya.

4.4.2 Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Personil Militer Indonesia

Peningkatan kapabilitas militer yang dilakukan Indonesia juga tercipta melalui adanya setiap peningkatan jumlah personil militer dan populasi Indonesia. Dalam hal ini, kekuatan personil militer Indonesia merupakan salah satu personil militer yang kekuatannya diakui oleh dunia internasional. Hal ini disebabkan Indonesia menempati urutan ke 12 sebagai negara dengan kekuatan militer yang patut diperhitungkan dunia dengan jumlah populasi penduduk yang tinggi ke empat di dunia (Gindarsah, 2014: 8) yang terlihat melalui tabel dibawah ini :

Tabel 2. Jumlah Peningkatan Populasi dan Tentara Indonesia (2007 – 2017)

Tahun	Jumlah Populasi	Jumlah Tentara
2007	210.409.323	302.000
2008	214.456.222	275.000
2009	220.123.450	312.000
2010	223.540.132	333.430
2011	232.516.771	343.000
2012	245.613.043	375.500
2013	249.455.123	383.500
2014	251.234.111	393.230
2015	253.609.643	395.500
2016	255.993.674	396.500
2017	258.123.435	398.870
Tentara Cadangan	258.123.435	

Sumber : Diolah dari *Military Balance, 2007 – 2017*

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa kekuatan militer Indonesia semakin bertambah dengan adanya jumlah populasi dan personel militer yang tinggi. Peningkatan kapabilitas militer dalam hal peningkatan kualitas dan kuantitas militer Indonesiapun terlihat melalui banyaknya kerjasama latihan militer gabungan dengan negara – negara besar seperti Rusia yang terjadi pada tahun 2017 sampai 2019 (BBC News Indonesia, 25 Februari 2017). Selanjutnya dengan Amerika Serikat yang terjadi pada tahun 2015 dan 2016 yang dimana semua satuan TNI menggelar latihan dengan militer AS. Misalnya, Korps Marinir TNI latihan bersama dengan pasukan Marinir AS (USMC), TNI AD dengan *US Ranger*, TNI AU bersama *US Special Force Pasific Command*, Kopaska TNI AL bersama *Navy Seal*, dan lainnya (BBC News Indonesia, 24 Januari 2017).

Kemudian dilanjutkan dengan latihan militer gabungan antara Angkatan Udara Thailand atau *Royal Thai Air Force (RTAF)* dengan TNI AU Indonesia yang terjadi pada tahun 2017 (BBC News Indonesia, 8 Oktober 2017). Sehingga dengan adanya berbagai latihan militer gabungan tersebutlah yang pada akhirnya tidak mengherankan jika banyak negara yang mempertimbangkan kekuatan Indonesia dan kerap kali meminta bantuan ataupun relawan terhadap personel militer Indonesia dalam menangani suatu konflik ataupun hal lainnya.

4.4.3 Peningkatan Alat Utama Sistem Persenjatan (ALUTSISTA) Indonesia

Pada tahun 2007, Indonesia perlahan mulai meningkatkan alat persenjataan perangnya, hal ini terjadi dalam mengantisipasi berbagai isu ancaman yang akan datang dari luar. Sehingga pada akhirnya Indonesia mulai melakukan kerjasama militer dengan negara lain seperti Rusia dan juga Korea Selatan dalam hal pembelian persenjataan perang seperti pesawat tempur dan

juga kapal selam(BBC Indonesia, 20 Juli 2015). Jumlah peningkatan ALUTSISTA Indonesia dapat terlihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 3. Jumlah Peningkatan Alat Utama Sistem Persenjataan Indonesia Tahun 2007 – 2017.

Tahun	Jenis ALUTISTA
2007	Main Battle Tank : 30 buah tipe Leopard 2A Armored Personal Carrier : 356 Aircraft : 27 buah Helicopter : 81 buah Towed : 135 Submarine :2 buah tipe FFGHM Frigates : 8 buah
2009	Helicopter attack : 6 buah tipe MI 35P Hind Submarine : 2 tipe Cakrat (SUT HWT) Frigates : 11 Kapal Ahmad Yani Aircraft : 11 DHC – 5 Buffalo
2011	Helicopter Attack : 6 tipe Mi – 35P Hind Submarine : 2 kapal tipe Cakrat With SUT HWT Aircraft: 9 tipe , 2 tipe BN – 2A Islander, 6 tipe C-212 dan 2 tipe Turbo Commander
2012	Aircarft : 9 tipe TOT Helicopter : 12 tipe Hughes 300 C Frigates : 11 kapal
2014	Main Battle Tank : 26 tipe Leopard 2A9 Aircarft : 9 tipe BN-2A Islander Helicopter : 41 MI- 35P Hind Submarine : 2 kapal tipe SSK
2016	Aircarft : 2 Turbo Commander 680 Helicopter : 12 Buah TRG Hughes 300C
2017	Kapal Selam KRI Nagapasa 403 Kapal Selam DSME 209 Aircraft : 11 jet tempur tipe Sukhoi SU-35 MK2 Rusia

Sumber : Diolah dari Millitary Ballance, 2007 – 2017.

Berdasarkan data di atas maka kita dapat menganalisis bahwa perkembangan alat utama sistem persenjataan Indonesia cukup meningkat

sepanjang tahunnya hingga pada akhirnya pada tahun 2017 jumlah ALUTSISTA yang dimiliki Indonesia mencapai tank lapis baja 400 unit, kendaraan tempur lapis baja 506 unit, artileri jarak jauh 62 unit, peluncur roket 50 unit, mortir 3.350 unit, senjata antitank 11 ribu unit, dan kendaraan angkut logistik 11.100 unit, kapal perang 150 unit, kapal selam 10 unit, kapal angkut personel 26 unit, kapal kelas korvet 23 unit, kapal kelas frigat 45 unit, kapal patroli 70 unit, serta pesawat tempur 118 unit yang dimana 50 unit pesawat tempur sergap dan 68 pesawat tempur taktis (Defense White Paper Indonesia, 2017).

Perkembangan ALUTSISTA Indonesia tentunya juga tidak hanya terlihat melalui setiap perkembangan persenjataannya namun juga terlihat dari setiap industri pertahanan yang dimiliki oleh negara dalam memproduksi suatu persenjataan perang. Salah satu contoh persenjataan perang yang berhasil dibuat oleh Indonesia yaitu Pesawat CN235-220 MPA yang merupakan produksi anak negeri yang sudah banyak dibeli oleh negara - negara sahabat untuk keperluan patroli laut, sedangkan Helikopter Serang AS555AP Fennec serta Helikopter AS565 Mbe Panther adalah hasil kerjasama PT DI dengan Airbus Helicopters Perancis (BBC Indonesia, 2017). Namun untuk fase integrasi AKS sejak design hingga pemasangan adalah hasil karya PT DI.

Memiliki pertahanan yang tangguh adalah sebuah kebutuhan mendasar bagi setiap bangsa. Kemampuan pertahanan tidak saja penting dalam menjaga keselamatan bangsa, tetapi juga simbol kekuatan serta sarana untuk menggapai cita-cita, tujuan, ataupun kepentingan nasional. Efektivitas pertahanan negara turut ditentukan juga oleh kemampuan industri pertahanan dalam memenuhi kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan alat utama sistem senjata (alutsista)

secara mandiri. Oleh sebab itu, industri pertahanan perlu dibangun melalui revitalisasi industri pertahanan.

Kemampuan industri pertahanan dalam negeri Indonesia sekarang ini sudah pada tingkat teknologi menengah. Artinya, industri pertahanan Indonesia sudah dapat membuat dan sudah digunakan oleh TNI. Sebagai contoh, ALUTSISTA darat buatan PT Pindad mulai dari pistol dan senjata serbu sampai mortir serta kendaraan tempur roda ban (panser Anoa) sudah mendukung kebutuhan TNI AD. Bahkan, produk PT Pindad itu sekarang sudah berstandarisasi PBB, demikian juga kendaraan taktis pengintainya. Saat ini sedang berlangsung pembaruan kendaraan tempur roda rantai (tank AMX-13) yang merupakan awal membangun tank ringan. Setelah itu diharapkan kita bisa membuat sendiri tank ringan sampai berat (BBC Indonesia, 7 Mei 2017).

Dalam ALUTSISTA matra udara, PT Dirgantara Indonesia kini sedang mengembangkan kerjasama produksi dengan Airbus Military untuk membangun pesawat angkut sedang CN 2952 . Indonesia sangat berkepentingan untuk meningkatkan kemampuan memproduksi pesawat angkut ringan, seperti C-212, CN 235, dan CN 295, yang bermuatan 50 penerjun. Hal yang sama dilakukan dalam pembuatan helikopter serbu Bell-412 dan heli Cougar 725. PT Dirgantara Indonesia diharapkan bisa memenuhi sebagian kebutuhan dari TNI dan cocok untuk operasi kemanusiaan (BBC Indonesia, 7 Mei 2017).

Selain itu, Indonesia juga memiliki beberapa industri pertahanan ALUTSISTA matra laut dalam negeri yang bisa diandalkan. PT PAL diandalkan untuk pembuatan kapal perang skala besar, seperti class korvet dan kapal selam. PT PAL juga didorong untuk membuat kapal perang untuk tanker. Indonesia juga

memiliki badan usaha milik negara yang lain, yaitu PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari. BUMN ini diberi porsi untuk membangun Landing Ship Tank atau kapal pengangkut tank ringan dan sedang. Industri pertahanan swasta juga sudah memberikan kontribusi besar untuk kapal patroli cepat ukuran 60 meter ke bawah, seperti Palindo, Lundin, Anugrah (BBC Indonesia, 7 Mei 2017).

Data lain yang menunjukkan jumlah Industri Pertahanan yang dimiliki oleh Indonesia menurut data yang tertera dalam *Defense White Paper* Indonesia tahun 2017 meliputi

Dislitbangad: Remote Control Weapon System, Dislitbangal: Munisi dan senjata APS, Dislitbangau: Modulator TWT Radar Thomson, BPPT: UAV Wulung, LIPI: ISRA Coastal radar, Lapan: Roket Φ 122 mm, PT Pindad: MRAP, tank medium, PT Dirgantara Indonesia: Pesawat CN-295, PT PAL: PKR 105. KCR-60, LPD-125, FPB-57, PT LEN: Combat Management System, PT Dok Kodja Bahari: Kapal BCM-122, PT Lundin Industry Invest: KCR trimaran kelas Klewang, PT Auto Car: Engine, CV Indopulley Perkasa: Ban runflat, Boogie Wheel, PT Infoglobal Teknologi Semesta: MPD, MFD, PT Sari Bahari: Bom P-100 dan P-250, PT Fista Bahari Internusa: Life craft, PT Tesco Indomaritim: Landing Craft Vehicle Personnel, CV Maju Mapan: Payung Udara Barang, PT Infra RCS: Surveillance, CV Nuslisty Abadi Medika: Kelambu Malaria, PT CMI: Teknologi Radar APQ 159 untuk pesawat F-5, PT Palindo Marine: KCR-40, KP-110, PT Persada Aman Sentosa: Helm & Rompi Tempur, PT Indah Angurah Abadi: Azimuth Rudder Propeller, PT Maju Sentosa Pertiwi: Minyak Senjata dan Kimia Perawatan, PT Saba Wijaya Persada: Helm dan Rompi Tempur, PT Aura Sakti Engineering: Peralatan Alins/Alongins (Indonesia Defence Magazine, 2017).

4.5 Analisis Kepentingan Australia Terhadap Indonesia

Indonesia dan Australia adalah dua negara yang bertetangga dekat dan telah lama menjalin hubungan kerjasama dalam berbagai bidang. Kedekatan geografis di antara kedua negara yang menjadikan Indonesia dan Australia merasa penting untuk menjalin hubungan itu, meskipun dalam fenomenanya sering dihiasi oleh berbagai gesekan atau ketegangan. Dengan kata lain, meskipun Indonesia dan Australia dua negara yang bertetangga dekat, namun memiliki perbedaan dalam berbagai hal, yang dalam perjalanan hubungan antar kedua negara memberikan dinamika dalam hal ketegangan bahkan perselisihan (Ikrar Nusa Bakti,2008:279).

Perselisihan dan ketegangan yang dialami oleh Australia dapat terjadi karena berbagai hal yakni salah satunya akibat adanya kekhawatiran Australia terhadap peningkatan kapabilitas militer yang dilakukan Indonesia yang nantinya akan meningkatkan kekuatan militer Indonesia. Hal tersebutlah yang pada akhirnya memicu perselisihan dan kekhawatiran Australia dalam menentukan posisinya. Apabila dilihat dari respon Australia dari segi keamanan, Australia terlihat turut meningkatkan peningkatan kapabilitas militernya dan bahkan melakukan berbagai tindakan agresif yang melanggar kedaulatan Indonesia. Namun hal yang unik terjadi kepada Australia yang dimana ditengah terjadinya intensitas ancaman Australia akan Indonesia, Australia tetap melakukan pembangunan kerjasama yang erat dengan Indonesia.

Dalam hal ini, penulis menganalisis bahwa terdapat empat persepsi kepentingan nasional Australia yang membuat Australia tetap melakukan hubungan kerjasam dengan Indonesia. Persepsi Australia terhadap Indonesia

dapat dibagi ke dalam empat bagian, yaitu persepsi psiko-historis, persepsi psiko-kultural, persepsi geografis dan persepsi ekonomi (Ikrar Nusa Bakti, 2008 :297). Dari sisi persepsi historis, Australia yang tumbuh sebagai negara imigran yang dimulai sejak pemukiman narapidana pada Januari 1888, amat peduli dengan perkembangan di negara-negara tetangga utaranya. Sampai dengan awal 1970-an, Australia merasa sebagai bangsa kulit putih yang dikelilingi oleh bangsa kulit berwarna (Ikrar Nusa Bakti, 2008 :297).

Berdasarkan penjelasan diatas maka terlihat bahwa Australia sangat takut dengan bahaya invasi kultural maupun invasi militer dari utara khususnya dari Jepang dan Republik Rakyat China. Kebijakan politik luar negeri Australia terhadap Asia dibawah pemerintah *Liberal-Nasional Country* pada saat tahun 1950-1972, lebih menonjolkan keikutsertaan Australia di dalam aliansi militer Barat di bawah Amerika Serikat, seperti dalam Pakta ANZUZ (*Australia, New Zealand and United States*) yang dibentuk tahun 1951 dan Pakta Pertahanan Asia Tenggara (SEATO) yang dibentuk tahun 1954, dan Pakta Pertahanan Lima Negara (*Five Powers Defence Arrangement-FPDA*) yang dibentuk pada tahun 1971 antara Inggris, Australia, New Zealand, Malaysia dan Singapura untuk membantu Singapura dan Malaysia apabila kedua negara tersebut mendapat ancaman dari luar (Ikrar Nusa Bakti,2008:299).

Sesuai dengan persepsi sejarah ini pula, Indonesia dipandang sebagai negara yang bisa menjadi penyangga (*buffer-state*) (Ikrar Nusa Bakti,2008:278) dari serangan militer musuh-musuh Australia. Pada dasarnya *Buffer State* (Negara Penyangga) adalah Negara yang terletak diantara kekuatan besar (Negara) yang bermusuhan atau memiliki potensi untuk bermusuhan(Armstrong,2017:45). Hal

itulah yang membuat Australia ingin tetap bersahabat dengan Indonesia dan tak ingin Indonesia jatuh ke tangan suatu pemerintahan nasional yang komunis atau ke tangan negara asing yang bermusuhan dengan Australia. Dari persepsi sejarah pula, sepak terjang Indonesia di dalam merebut kembali Irian Barat, konfrontasi dengan Malaysia dan integrasi Timor Timur dipandang oleh beberapa kalangan di Australia bahwa Indonesia memiliki sifat ekspansionis dan agresif.

Dari persepsi psiko-kultural, Indonesia dipandang sebagai suatu bangsa Asia berkulit berwarna yang berbeda secara budaya dengan kebanyakan warga negara Australia yang berkulit putih. Di masa lalu, persepsi ini menjadi kendala dalam membina hubungan baik Jakarta-Canberra, khususnya saat Australia berada dibawah pemerintahan PM Robert Gordon Menzies maupun para penerusnya di bawah pemerintahan koalisi Partai Liberal-Nasional/Country (Ikrar Nusa Bakti,2008:280).

Namun, pada saat masa kepemimpinan PM Paul Keating ini terlihat bahwa Australia berupaya membangun suatu “Kemitraan didalam Keberagaman” (*Partnership in Diversity*) dengan Indonesia. Bagi Australia, Indonesia adalah suatu negara tetangga dekat yang berbeda sistem politik dan budayanya. Namun perbedaan itu tidaklah lagi menjadi kendala, tetapi bahkan memperkaya sifat hubungan bilateral kedua bangsa dan negara (Ikrar Nusa Bakti,2008:282).

Kemitraan didalam keberagaman ini sebenarnya telah terlihat sejak Indonesia sebelum merdeka yakni meliputi yang pertama, ketika serikat Buruh Australia, terutama serikat buruh pelabuhan membantu perjuangan Indonesia dalam upaya mempertahankan kemerdekaan dan meraih pengakuan Internasional, dengan menolak melayani kapal-kapal Belanda atau sekutunya. Kedua, peran

UNCI (*United Nations Commission on Indonesia*) / KTN (Komisi Tiga Negara, dimana wakil Australia duduk atas usulan Indonesia (Thayeb,2008:39). Dalam hal ini bantuan Australia tersebut memberikan tekanan besar kepada Belanda untuk berunding, dan akhirnya memberikan pengakuan atas kedaulatan Indonesia.

Selanjutnya terlihat juga pada tahun 1988 yang dimana secara kebetulan, pada 1988 terjadi pergantian menlu di Australia dan Indonesia, Menlu Gareth Evans menggantikan Bill Hayden yang diangkat sebagai Gubernur Jenderal Australia, sedangkan Menlu Ali Alatas menggantikan Mochtar Kusumaatmadja. Kedua menlu memiliki visi yang sama untuk membina hubungan bilateral secara lebih baik dan juga berkerjasama dalam memainkan peran positif dalam mempromosikan perdamaian di kawasan Asia Tenggara, seperti dalam penyelesaian masalah Kamboja, peningkatan ASEAN Regional Forum, dan memakmurkan Asia Pasifik melalui APEC (Ikrar Nusa Bakto,2008 :345).

Bukti lainnya yang menunjukkan kedekatan hubungan Australia dan Indonesia tetap terjaga juga terlihat melalui kebijakan *Ambassador's Principals Lecture Series Australia* atau yang biasa dikenal dengan PLS yang diprakarsai oleh Duta Besar Paul Grigson di tahun 2015 sebagai bagian dari komitmen Kedutaan Besar Australia untuk mendukung pendidikan di Indonesia. Sejak saat itu, PLS telah diadakan di Kedubes Australia Jakarta, dan di Konsulat Jendral Australia di Bali, Makassar, dan Surabaya. Serta kebijakan *Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ2)* yang merupakan kemitraan antara pemerintah Australia dan Indonesia untuk memperkuat institusi peradilan dan keamanan Indonesia serta berkontribusi terhadap stabilitas dan kemakmuran Indonesia dan kawasan yang terjadi pada tahun 2017. Kemitraan ini berfokus untuk mendukung

kegiatan seperti transparansi, akuntabilitas, dan antikorupsi, mengatasi kejahatan lintas batas dan memperkuat keamanan, mencegah ekstremisme kekerasan, reformasi pemasyarakatan, dan pengembangan kemitraan (aipj.or.id, 5 April 2017).

Sedangkan, dari segi persepsi geografis/geopolitik/geostrategis, seperti telah dikatakan diatas, Indonesia adalah negara tetangga terdekat bersama Papua Nugini yang bisa menjadi penyangga dari serbuan negara - negara kuat Asia. Hal ini terbukti ketika kedua negara tersebut menjadi penyangga serbuan Jepang ke selatan selama Perang Pasifik (Perang Dunia II). Sehingga, dari semua persepsi diatas menyebabkan Australia kadang-kadang memandang Indonesia sebagai negara “dari dan melalui mana serangan terhadap Australia bisa dilakukan” (Ikrar Nusa Bakti,2008:292). Perkembangan politik serta keamanan regional dan internasional pasca Perang Dingin menyebabkan Australia ingin membangun “Kemitraan Strategis” (*Strategic Partnership*) dengan negara - negara Asia umumnya, khususnya dengan Indonesia. Dalam Buku Putih Pertahanan Australia 1994 untuk pertama kalinya Australia memandang bahwa masa depan keamanan ekonomi sangat tergantung pada Asia, termasuk kepada Indonesia (Department of Defense Australia,1994 : 88).

Dari persepsi ekonomi, Indonesia adalah negara yang cukup penting bagi pembangunan ekonomi Australia. Selain kaya akan sumber daya alam, Indonesia juga memiliki jumlah penduduk yang melimpah sehingga bisa dijadikan pasar bagi barang-barang Australia. Untuk menjadikan Indonesia sebagai pasar, Australia tentunya harus membantu pembangunan ekonomi dan sumber daya manusia.

Bantuan luar negeri yang diberikan Australia dipandang sebagai “motif politik dan ekonomi”. Dengan kata lain, dari segi ekonomi, Australia membantu Indonesia untuk membantu dirinya sendiri. Indonesia juga dipandang oleh Australia sebagai mitra terdekat di dalam mensukseskan program-program Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) yang dicanangkan mantan PM Bob Hawke pada 1989. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika PM Paul Keating selalu aktif melakukan kontak secara pribadi dengan Presiden Soeharto saat itu baik menjelang pertemuan para pemimpin ekonomi APEC (*APEC- Economic Leader’s Meeting-AELM*) di Seattle, Amerika Serikat, pada November 1993, menjelang AELM II di Bogor bulan November 1994, dan AELM III di Osaka 1995 (Ikrar Nusa Bakti,2008:300).

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa sikap dan keputusan pemerintah Australia dalam melakukan kerjasama militer dengan Indonesia merupakan salah satu bentuk strategi yang dilakukan Australia dalam mempertahankan wilayah keamanan negaranya dari berbagai ancaman yang datang seperti permasalahan keamanan Maritim, pengungsi ilegal dan juga ancaman dari negara – negara kuat di Asia yang menjadi musuh Australia.

BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap respon yang diberikan Australia akan adanya kekhawatiran peningkatan kapabilitas militer Indonesia dalam kurun waktu 2007 – 2017 dan melalui konsep yang telah digunakan maka dapat disimpulkan bahwa respon yang diberikan akibat peningkatan kapabilitas militer yang dilakukan Indonesia yakni meliputi :

1. Peningkatan kapabilitas militer

Peningkatan kapabilitas militer yang dilakukan Australia merupakan salah satu bentuk persiapan Australia akan sewaktu – waktu Indonesia memutuskan kerjasama pertahanan dengan Australia karena memilih bekerjasama dengan negara yang lebih kuat. Sehingga, Australia mampu untuk tetap menjaga keamanan dan kedaulatan negaranya dari berbagai ancaman seperti perihal permasalahan pengungsi ilegal ataupun ancaman dari utara seperti Jepang dan Republik Rakyat China.

2. Tindakan agresif yang memicu konflik

Tindakan agresif yang dilakukan Australia terhadap Indonesia dalam bentuk penyadapan akan pemerintah Indonesia, pelanggaran teritorial yang dilakukan personil militer Australia, penyuapan para kapten dan awak kapal para pengangkut pengungsi ilegal, pembongkaran beberapa

senapan senjata Indonesia merupakan bentuk respon alami Australia akan kekhawatirannya terhadap kekuatan militer Indonesia.

3. Kerjasama Pertahanan dan Militer Indonesia - Australia

Kerjasama pertahanan dan militer yang turut dilakukan dan dibangun Australia melalui Traktat Lombok yang dimana traktat ini menjadi payung legal kerjasama kedua negara di bidang pertahanan-keamanan yang mencakup sepuluh bidang seperti *Law Enforcement*, keamanan Maritim, keselamatan dan keamanan penerbangan, kontra terorisme, *emergency*, *Intelegent* and *Community Understanding*, dan *People-To-People Cooperation*.

Dalam hal ini Traktat Lombok merupakan salah satu strategi yang dilakukan Australia dalam mempertahankan Indonesia sebagai mitra keamanannya. Hal inipun tentu saja terjadi karena adanya kepentingan nasional yang dibawa Australia terhadap Indonesia mengingat Indonesia merupakan negara penyangga bagi Australia dalam menghadapi berbagai ancaman dari utara, permasalahan pengungsi yang sangat mengganggu kedaulatan ekonomi dan sosial Australia ataupun permasalahan teroris dan juga ekonomi, mengingat bahwa Indonesia merupakan pasar bagi Australia.

6.2. Saran

Dari hasil penelitian dan pemaparan kesimpulan di atas dan sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian terkait respon Australia terhadap peningkatan kapabilitas militer Indonesia tahun 2007 – 2017, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Melihat dari peningkatan kapabilitas militer yang dilakukan oleh Australia dalam merespon peningkatan kapabilitas militer adalah hal yang wajar dilakukan suatu negara dalam meningkatkan keamanan negaranya. Namun, seyogianya pemerintah Australia lebih menekankan strategi peningkatan kapabilitas militernya kearah yang jauh lebih defensi dan kooperatif terkhusus terhadap negara Indonesia.
2. Melihat dari berbagai tindakan agresif yang dilakukan oleh pemerintah Australia yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik, seyogianya pemerintah Australia tidak perlu melakukan hal tersebut karena dapat merusak rasa kepercayaan yang dapat merugikan kedua negara.
3. Kerjasama militer yang telah dilakukan oleh pemerintah Australia dan Indonesia merupakan suatu tindakan yang rasional dan baik. Sehingga bentuk kerjasama militer ini seyogianya terus ditingkatkan melalui berbagai kerjasama seperti latihan gabungan personil militer, kerjasama dalam penanganan permasalahan pengungsi ilegal dan juga terorisme serta kerjasama dalam pembuatan dan jual beli ALUSTSISTA.

Rekomendasi

Dalam hal ini peneliti juga memberikan rekomendasi kepada peneliti selanjutnya yang ingin meneliti dengan tema yang sama, diharapkan mampu meneliti lebih baik lagi dan mencari objek yang lebih luas dari penelitian ini. Serta, diharapkan penelitian selanjutnya bisa lebih banyak mencari referensi dari berbagai buku dan jurnal ataupun tulisan ilmiah lainnya untuk mendukung penelitian dengan tema yang sama demi pengembangan penelitian terkait hubungan antara Indonesia dan Australia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Agus, Sujana, 2004, *Psikologi Umum*, Jakarta: Bumi Aksara.

Ahmad Subandi, 1982, *Psikologi Sosial*, Jakarta: Bulan Bintang.

Booth, Ken and J, Wheeler, Nicholas. 2008. *Rethinking The Security Dilemma*. Harvard University Press.

Dennis Kavanagh, 1992. *Political Science and Political Behavior, dalam FS Swartono, dan Ramlan*.

Surbakti, PT Gramedia Wilmasarna: Jakarta.

Elster. 1989. *Nuts and Bolt for The Social Science*. Cambridge University: Cambridge.

Government, Australian, 2016, "*Defence White Paper Australia 2016*", Department of Defence : Australia.

Gray, Colin. 1992. *The Grammar of Strategy II: Altitude and Electrons*,. Oxford: Oxford University Press.

Hanlon, E Michael, 2009, *The Science of War : Defense Budgeting, Military Technology, Logistics and Combat Outcomes*, USA, Princeton University Press.

Herz, Jhon. 1950. *Idealist Internationalism and the Security Dilemma, World Politics vol. 2*. Britain: Cambridge University Press.

International Institute For Strategic Studies, 2007 - 2017, *The Military Balance, University Phoenix*.

Jalaludin Rahmat, 1999, *Psikologi Komunikasi*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Janet Heaton. 2004. *Reworking Qualitative Data*. London. SAGE Publications Ltd.

Jervis, R. 1978. *Cooperation under the Security Dilemma*, " *World Politics vol. 30*. Princeton: Princeton University Press.

Jhon Baylis & Steven Smith. 2001. *The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations, Third Edition*. Britain: Oxford University Press.

K. Denzin, Norman dan Yvona S. Lincoln. 2011. *The SAGE Handbook Of Qualitative Research*. Thousand Oaks, CA. SAGE Publications, Inc.

Miles, M.B. & Huberman, A.M. 1994. *Qualitative Data Analysis*. California: Sage Publication.

Nusa Bhakti, Ikrar. 1996 "Kilas Balik Hubungan Indonesia-Australia dan Prospeknya di Masa Akan Datang." dalam Profil Indonesia. Jurnal Tahunan CIDES No.2.

Poerdawarminta, 1999, Psikologi Komunikasi, Jakarta: UT.

Pramitha, Dwi, Arthanty, 2016, *Diplomasi Pertahanan Indonesia- Australia Dalam Hubungan Comprehensive Partnership Keamanan Maritim*, Universitas Pertahanan.

Rahmat, Bramatidjaja, 1997, *Ensiklopedi Geografi Indonesia*, Bandung, Departemen Geologi ITB.

Richard Robison. 1986: *The Rise of Capital*. Sydney. Indonesia.

Shapiro, J. 2010. *A Theory of Security Strategy for Our Time*. Palgrave Macmillan.

Soenarjo dan Djoenarsih S. Soenarjo, 1983, *Himpunan Istilah Komunikasi*, Yogyakarta: Liberty.

Steven Van Evera. 1998. *Offense – Defence and the Cause of War, International Security, Vol 22 No 4, Spring*. Massachusetts: MIT Press.

Suryadi U. Bakry. 2016. *Metode Penelitian Hubungan Internasional*. Jakarta: Pustaka Belajar.

Susa, E. Wyse, 2011, *Qualitative Methodology*, Britain: Oxford University Press.

Thayeb, T.M Hamzah. 2008. "Hubungan Indonesia-Australia Pasca Kemengan Partai Buruh", *Jurnal Luar Negeri* Vol 25 No.1.

Waltz, Kenneth. 1979. *Theory of International Politics*. Britain : Oxford University Press.

Ward, Hugh, 2002. *Rational Choice dalam Marsh, David dan Gerry Strocker, Theory Methods in Political Science*. Palgrave MacMillan.

Vogel, Hinds .1997.*The Possibilities And Pitfalls of Doing Secondary Analysis of Qualitative Dataset*, dalam *Qualitative Health Researc*.California : Sage Publication.

Jurnal

Arah Politik Australia, diakses pada 17 Mei 2018,tersedia di http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR._PEND._SEJARAH/197101011999031-WAWAN_DARMAWAN/arah_politik_australia.pdf.

John C King, *Qualitative Research In Method In International Affairs For Master Students*, diakses dari https://www.american.edu/sis/crs/upload/2011SP-SIS-680-001_King.pdf

Kebijakan OSB Australia, diakses pada 5 Juni 2016, tersedia di <https://media.neliti.com/media/publications/19422-ID-kebijakan-operation-sovereign-borders-australia-dalam-penanganan-manusia-perahu.pdf>

Letak Geografis Indonesia,diakses pada 24 Juni 2018, tersedia di http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR._PEND._GEOGRAFI/195502101980021-DADANG_SUNGKAWA/Bahan_Ajar_GRI/GRI_Gabungan_Cetak.pdf , Letak Geografis Indonesia.

Penangkapan Nelayan Indonesia, diakses pada 22 Juli 2012, tersedia di <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/23688/Enggra%20Mamonto-E131%2013%20007-%20Ilmu%20Hub.Internasional.pdf?sequence=1>.

Politik Luar Negeri Indonesia,diakses pada 25 Juni 2018,tersedia di <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/12288/f.%20bab%20ii.pdf?sequence=6&isAllowed=y> Politik LuarNegeri Indonesia.

Persepectives on Australian Foreign Policy 1997,Australian Journal of International Affairs, Vol.52, No.2, 1999.diakses pada 7 Juli 2018,tersedia di <https://anzdoc.com/bab-iv-kebijakan-politik-australia-terhadap-indonesia-pada-om.html>.

Situs Resmi

Australian Defence Magazine, Vol.23, No.1, December 2014/January 2015, Top 40 Defence Contractors and Top 20 SMEs Survey, p. 27. Diakses pada 8 Agustus 2018,tersedia di <http://www.australiandefence.com.au/>.

Australia – Indoneasia Partnership for Justice,diakses pada 17 Agustus 2018,tersedia di <https://aipj.or.id/>.

Commonwealth of Australia, Defence White Paper 1987: The Defence of Australia, Canberra: AGPS, 1987, diakses pada 20 Juni 2018, tersedia di <http://www.defence.gov.au/WhitePaper/>.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Laporan Keuangan 2017, diakses pada 5 Mei 2018, tersedia di <https://www.kemenkeu.go.id/>.

Kementerian Pertahanan Indonesia, diakses pada 20 Agustus 2018, tersedia di <http://www.dephan.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=7723>.

The Power of Australia, diakses pada 7 Mei 2018, pukul 20.20 WIB, tersedia di <http://sea1000.gov.au/>.

Berita Dsb

Eksekusi Mati Pengedar Narkoba Asal Australia, diakses pada 4 Mei 2018, tersedia di http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/04/160428_indonesia_eksekusi_mati.

Indonesia disadap Australia, diakses pada 14 Mei 2018, tersedia di http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2013/11/131120_bin_sadap_australia.

Julie Bishop apologises to Indonesia over breach of territorial waters, diakses pada 20 Mei 2018, tersedia di Sydney Morning Herald, <https://www.smh.com.au/>.

Keberagaman Indonesia – Australia, diakses pada 19 Agustus 2018, tersedia di <https://nasional.tempo.co/read/1070595/pm-turnbull-puji-jokowi-yang-merawat-keberagaman-di-indonesia>.

Kepentingan Nasional Australia Terhadap Indonesia, diakses pada 19 Agustus 2018, tersedia di dalam The National Interest, 1997, pp. 1-16, berdasarkan kutipan dari Buana Katulistiwa, 2005).

Skandal Suap Imigran, diakses pada 10 Agustus 2018, tersedia di <https://tirto.id/skandal-suap-imigran-yang-menggoyang-indonesia--australia-bSGt>.